**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perjuangan membangun sebuah negara baru tidak hanya sampai pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Usaha dan rasa kebersamaan yang menjadi slogan rakyat Indonesia masih terus mendapat tantangan guna membuktikan bahwa imperialisme dan kolonialisme akan sepenuhnya lenyap dari bumi pertiwi. Ujian yang silih berganti seakan tidak lepas pada tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia. Hal ini disadari dengan baik oleh para *the founding father* dan masyarakat Indonesia secara umum, bahwa sejatinya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan.

Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia berasal dari dua arah yakni eksternal dan internal. Tantangan eksternal datang dari Belanda, yang pada dasarnya tidak menghendaki kemerdekaan Indonesia. Belanda berusaha mencari cara guna mengembalikan kedudukannya di Indonesia seperti semula, sebelum Jepang mengambil alih kekuasaannya dengan melancarkan agresi militer. Selain tantangan eksternal, secara bersamaan Indonesia juga menghadapi berbagai macam permasalahan dari dalam negerinya sendiri.

Pada dekade tahun 1950, perekonomian Indonesia berada dalam situasi yang tidak menentu. Terjadinya inflasi membuat sebagian besar masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan karena pertentangan politik yang sering terjadi sebagai konsekuesi dari sistem Demokrasi Parlementer. Para wakil rakyat lebih memikirkan kepentingan partainya semata dibandingkan membuat langkah strategis dalam menghadapi permasalahan ekonomi. Selain itu, gerakan-gerakan separatis yang mengarah pada pemberontakan juga bermunculan sebagai tantangan terhadap upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Pemberontakan–pemberontakan gencar dilakukan di berbagai daerah seperti gerakan DI/TII, PRRI-Permesta, dan Republik Maluku Selatan.

 Kabinet yang dibangun berlandaskan sistem Demokrasi Parlementer pada akhirnya harus menyerah oleh situasi politik yang ikut memanas dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, termasuk mengenai pemberontakan dan ketidakstabilan kondisi ekonomi di masa itu. Pergantian tujuh kabinet yang terjadi secara cepat selama kurun waktu sembilan tahun menyebabkan Presiden Soekarno khawatir akan situasi dalam negeri Indonesia, oleh karenanya diperlukan sebuah alternatif yang mampu menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan berbagai ancaman disintegrasi tersebut. Pada tahun 1957 di hadapan para petinggi negara, Presiden Soekarno mengemukakan suatu konsepsi yang menghendaki perubahan sistem ketatanegaraan secara fundamental yang dikenal dengan istilah Konsepsi Presiden.[[1]](#footnote-2) Keterlibatan Presiden Soekarno sebagai kepala negara yang memiliki tanggung jawab dalam mengamankan situasi politik, sosial dan ekonomi semakin menguat setelah mengetahui bahwa Dewan Konstituante yang terpilih pada pemilu tahun 1955 dengan tugas sebagai perancang Undang-Undang Dasar baru tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Adanya perbedaan kepentingan dari berbagai partai politik mengenai dasar negara mengakibatkan pertentangan tersebut tidak menemui ujungnya.

 Akumulasi dari berbagai macam permasalahan tersebut ialah kesengsaraan yang dialami oleh masyarakat, yang pada akhirnya disikapi oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan dekrit. Dekrit 5 Juli 1959 secara terperinci menetapkan pembubaran Dewan Konstituante, pemberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara serta pembentukan MPRS, DPRS dan DPAS. Keluarnya dekrit tersebut menandai masuknya Indonesia ke dalam babak baru. Masa ini kemudian dikenal dengan sistem Demokrasi Terpimpin yang menjadikan Presiden Soekarno sebagai satu-satunya pemimpin bangsa Indonesia.

 Demokrasi Terpimpin yang landasan ketatanegaraannya kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 diawali dengan pengambilan kebijakan-kebijakan yang diharapkan menjadi pengejawantahan atas nilai-nilai Pancasila. Penjelasan mengenai penetapan dekrit dan arah bangsa kedepannya, dituangkan dalam sebuah pidato Presiden Soekarno yang disampaikan tepat pada tanggal 17 Agustus 1959. Pidato yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” tersebut kemudian dirumuskan menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).[[2]](#footnote-3) Selanjutnya program-program yang termasuk dalam GBHN dianggap sebagai Manifesto Politik (MANIPOL).[[3]](#footnote-4)

 Manifesto politik yang digagas oleh Presiden Soekarno dengan beberapa ketua Dewan Pertimbangan Agung akhirnya dijadikan sebagai basis politik nasional di bawah pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang terbagi ke dalam lima prinsip yakni Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia.[[4]](#footnote-5) Secara keseluruhan, haluan negara tersebut dikenal dengan sebutan MANIPOL USDEK. Bentuk aplikatif atas MANIPOL USDEK tersebut ialah dibentuknya beberapa institusi kenegaraan yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Salah satunya yakni Front Nasional yang merupakan organisasi berbasis massa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat umum.

 Secara legalitas Front Nasional berdiri setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1959 Tanggal 31 Desember 1959. Pendirian Front Nasional didasarkan pada pertimbangan bahwa perlu diadakan suatu gerakan rakyat yang bersendikan pada Demokrasi Terpimpin, untuk segenap menyatukan kekuatan progresif dan memimpin gerakan masyarakat untuk mencapai cita-cita yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain atas pertimbangan tersebut, Front Nasional juga dimaksudkan untuk mengimbangi kekuatan partai politik dalam lingkup DPR. Menurut Dewan Nasional, Dewan Perwakilan Rakayat yang sesuai dengan asas Demokrasi Terpimpin harus mampu merangkul seluruh elemen masyarakat termasuk pula golongan fungsioanal.[[5]](#footnote-6) Adapun tujuan dari Front Nasional sendiri ialah menyelesaikan revolusi nasional Indonesia, pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, serta mengembalikan Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[6]](#footnote-7)

 Sejak dibentuk pada akhir tahun 1959, Front Nasional menjadi kekuatan baru yang langsung berada di bawah komando Presiden Soekarno. Front Nasional tidak hanya beranggotakan masyarakat biasa, namun juga turut menyertakan anggota partai dan para golongan karya di dalamnya. Melalui berbagai musyawarah-musyawarah pengurus besar dan pengurus daerah, Front Nasional menampakkan tajinya sebagai suatu lembaga yang penting dan dibutuhkan untuk membantu pemerintah baik pusat maupun daerah dalam usaha menyelesaikan revolusi.[[7]](#footnote-8) Program-program yang disusun difokuskan agar mampu menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat dan secara garis besar dituangkan dalam Panca Program Front Nasional Tahun 1963.

 Front Nasional yang merupakan salah satu organisasi yang bersifat nasional, secara serentak dibentuk di berbagai daerah di Indonesia. Sulawesi juga menjadi salah satu daerah penting dalam gerakan Front Nasional. Pada awal pembentukan Front Nasional, wilayah administratif masih bernama Sulawesi, namun beberapa bulan kemudian atau tepatnya pada tanggal 31 Maret 1960 melalui Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1960, wilayah Sulawesi dibagi menjadi dua yakni Sulawesi Selatan Tenggara dan Sulawesi Tengah Utara.[[8]](#footnote-9) Berdasarkan peraturan tersebut, maka berdirilah Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

 Sulawesi Selatan Tenggara yang merupakan bagian dari pengurus daerah Front Nasional memiliki peranan penting dalam mendukung berbagai program kerja organisasi tersebut. Front Nasional yang di awal berdirinya menjadi salah satu basis penghimpun massa untuk relawan pembebasan Irian Barat mendapatkan dukungan dari masyarakat Sulawesi Selatan Tenggara. Dukungan tersebut diwujudkan dengan mendaftrarkan diri sebagai relawan pembebasan Irian Barat sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Presiden Soekarno pada amanatnya yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat (Trikora).

 Masyarakat Sulawesi Selatan Tenggara juga menunjukkan partisipasinya terhadap upaya pembebasan Irian Barat dengan menyetujui keputusan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat yang membuat suatu komando pelaksana utama. Operasi tersebut bernama Komando Mandala yang mempunyai kekuasaan meliputi wilayah yang terbentang antara bujur 115 derajat timur hingga 141 derajat timur dan meliputi Kodam XIII/ Merdeka, Kodam XIV/ Hasanuddin, Kodam XV/ Pattimura, Kodam XVI/ Udayana, Kodamamar V, Kodamar VI, Korud II, dan Korud IV yang berpusat di Kota Makassar Sulawesi Selatan.[[9]](#footnote-10) Setelah permasalahan Irian Barat terselesaikan, maka relawan yang tersedia kembali diikutsertakan pada Aksi Menghancurkan (Ganyang) Malaysia melalui Operasi Dwikora. Operasi ini bertujuan mencegah berdirinya Negara Malaysia yang dinilai sebagai lambang imperialisme dan kolonialisme bagi negara-negara Asia Tenggara. Bersamaan dengan hal tersebut, Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara juga melaksanakan berbagai program kerja yang bersinggungan dengan masalah kesejahteraan rakyat. Pengurus cabang dan ranting yang ada di wilayah Sulawesi Selatan Tenggara menjalankan sejumlah agenda seperti pemberantasan buta huruf, penataan birokrasi kampung, pembentukan koperasi, pembangunan sekolah rakyat, dan berbagai kegiatan sosial ekonomi lainnya.

 Hal lain yang menarik dari keberadaan Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara ialah kemampuan organisasi ini bertahan di tengah-tengah kondisi Sulawesi Selatan Tenggara yang berada pada situasi bergolak. Menjelang akhir tahun 1950-an hingga paruh awal tahun 1960-an, Sulawesi Selatan Tenggara menjadi wilayah yang dijadikan basis gerakan pemberontak seperti DI/TII dan Permesta. Gerakan ini pada dasarnya adalah sebuah bentuk protes terhadap kondisi masyarakat Indonesia khususnya Sulawesi Selatan Tenggara yang pada saat itu sedang terpuruk akibat situasi politik yang tidak menentu.

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara selama kurun waktu antara tahun 1959-1967. Hal tersebut diangkat sebagai tema dan fokus penelitian karena Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara memiliki posisi yang strategis dalam mendukung program kerja yang diamanatkan oleh Pengurus Besar Front Nasional yang diketuai oleh Presiden Soekarno, terutama pada peranannya dalam Konfrontasi Militer Perebutan Irian Barat dan Operasi Dwikora Mengganyang Malaysia serta strategi pelaksanaan program yang dilakukan oleh Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dalam mengahadapi kondisi wilayah Sulawesi Selatan Tenggara yang sedang bergolak.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara?
2. Bagaimana aktivitas Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dalam rangka mewujudkan MANIPOL USDEK?
3. Bagaimana eksistensi Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 hingga tahun 1967?
4. **Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti memandang perlu untuk mencantumkan batasan agar penelitian ini menjadi lebih fokus dan terarah. Batasan masalah tersebut terbagi dalam beberapa bagian yakni batasan temporal, spasial dan tematik. Batasan temporal penelitian ini difokuskan pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Tahun 1959 merupakan awal pembahasan karena menjadi titik permulaan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang disertai pula dengan pembentukan Front Nasional secara resmi pada tanggal 31 Desember 1959. Adapun tahun 1967 menjadi batasan akhir pembahasan, karena merupakan tahun berakhirnya kekuasaan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan pembekuan Front Nasional secara resmi oleh keputusan MPR. Akan tetapi, untuk menjelaskan keadaan-keadaan yang menjadi latar belakang dari terbentuknya Front Nasional, maka penulis juga membahas mengenai kondisi ekonomi, sosial, dan politik masyarakat dan pemerintah Indonesia sebelum tahun 1959.

Selain dari batasan temporal, penelitian ini juga memberikan batasan spasial yang garis besarnya mencakup wilayah Indonesia dan Sulawesi Selatan Tenggara secara umum, namun secara khusus penelitian ini memfokuskan objek kajiannya pada wilayah Sulawesi Selatan saja, karena adanya keterbatasan sumber. Selanjutnya, sesuai dengan judul dan bahasan dalam penelitian ini, maka batasan tematik yang diangkat ialah sejarah sosial dan politik Sulawesi Selatan Tenggara. Tema tersebut sesuai dengan rangkaian peristiwa pada pembentukan Front Nasional Sulawesi Selatan Tenggara dan segala hal yang berada disekitarnya.

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang berjudul Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara 1959-1967 adalah:

* + - 1. Mengetahui latar belakang terbentuknya Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.
			2. Mengetahui aktivitas Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dalam rangka mewujudkan MANIPOL USDEK.
			3. Mengetahui eksistensi Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 hingga tahun 1967.
1. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap pengembangan ilmu sejarah terutama pada pembahasan yang meliputi sejarah sosial dan politik wilayah Sulawesi Selatan Tenggara.
2. Dapat memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan aspek kesejarahan yang dapat digunakan sebagai infomasi, guna dijadikan sebagai bahan diskusi.
3. Sebagai bahan referensi dalam pembahasan mengenai sejarah panjang sistem pemerintahan dan kondisi politik nasional Indonesia.
4. Sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang memiliki tema yang sama.
5. **Kajian Relevan**

 Setiap penyusunan karya ilmiah membutuhkan sumber-sumber sebagai pendukung dan penguat data. Oleh karenanya diperlukan suatu langkah yang disebut telaah pustaka. Hal ini dimaksudkan guna menjelaskan secara umum mengenai beberapa data atau referensi yang berasal dari tulisan orang lain, sehingga akan memperlihatkan perbedaan mendasar objek dan cakupan yang diteliti. Langkah ini menjadi penting, sebab menghindari adanya upaya penciplakan karya orang lain.

 Penelitian mengenai kondisi kehidupan rakyat Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin memang telah banyak dituliskan dalam berbagai macam buku, skripsi maupun jurnal. Hal ini pula yang terdapat pada buku yang berjudul “Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV” karya Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto yang memaparkan rangkaian peristiwa bersejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia sejak zaman pendudukan Jepang hingga berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soeharto. Buku ini menjelaskan dengan baik mengenai situasi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soekarno yang juga merupakan rentan waktu utama dalam penelitian ini. Akan tetapi, pembahasan menganai Front Nasional sebagai salah satu organisasi yang berkembang pada periode 1960-an tidak banyak diulas, sehingga penelitian Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara ini dapat memberikan sumbangsih dalam khazanah kesejarahan pada masa Demokrasi Terpimpin. Selain itu, terdapat pula skripsi yang membahas mengenai Front Nasional dengan judul “Front Nasional Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)” karya Zesfi Ferbriani. Tulisan ini menjelaskan mengenai proses terbentuknya hingga berakhirnya Front Nasional, namun tidak secara spesifik membahas mengenai perkembangan pengurus Front Nasional yang ada di daerah terutama Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara yang menjadi inti dari penelitian ini.

 Penelitian ini juga didukung oleh buku yang berjudul “Panca Azimat Revolusi Jilid I dan II. Buku tersebut merupakan tulisan-tulisan dan pidato-pidato Presiden Soekarno dari tahun 1926 hingga tahun 1966. Pada beberapa tulisannya, Presiden Soekarno mengungkapkan pandangannya tentang cara yang tepat untuk meraih dan mengisi kemerdekaan Indonesia, termasuk penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan yang diambilnya (pelaksanaan MANIPOL USDEK) selama ia menjadi Presiden Indonesia, sehingga buku ini menjadi salah satu referensi untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi pada era tersebut. Selanjutnya, untuk mengetahui peranan Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sebagai organisasi yang bergerak di bidang mobilisasi massa pembebasan Irian Barat, maka peneliti menggunakan sumber buku yang berjudul “Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian-Barat” karya M. Cholil dan “Konfrontasi Militer Merebut Irian Barat” karya Ferry Valdano Akbar yang membahas mengenai berbagai upaya yang dilakukan untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi baik melalui jalur diplomasi maupun kemiliteran. Buku ini pada dasarnya memberikan penjelasan mengenai relawan-relawan yang ikut serta dalam berbagai Operasi Pembebasan Irian Barat, namun penjelasannya tidak memfokuskan kepada relawan Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sebagai tuan rumah dari Operasi Komando Mandala.

1. **Metode Penelitian**

 Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif. Metode ini sering digunakan dalam ilmu sejarah dan ilmu sosial lainnya dengan tujuan untuk menemukan suatu hal yang unik dan mampu mengungkapkan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau.[[10]](#footnote-11) Penelitian ini juga merupakan penelitian sejarah yang bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan secara analitis serta menginterpretasikan hal-hal yang terkait dengan Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara 1959-1967. Penelitian ini termasuk dalam kajian sejarah sosial dan politik yang menjelaskan aktivitas Front Nasional di wilayah Sulawesi Selatan Tenggara pada tahun 1959-1967.

Penulisan karya imiah tidak terlepas dari suatu prosedur yang biasa disebut dengan metode. Secara terperinci, metode merupakan prosedur, proses, atau teknik yang sistematis untuk melakukan penelitian disiplin ilmu teretentu.[[11]](#footnote-12) Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode sejarah merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau, melalui empat tahapan kerja yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (eksternal/bahan dan internal/isi), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah).[[12]](#footnote-13)

* + 1. **Heuristik**

Heuristik merupakan langkah awal dari metode penelitian sejarah, dimana pada tahap ini seorang peneliti mencari dan mengupayakan penemuan atas sumber sejarah yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Sumber sejarah tersebut dapat berupa catatan, tradisi lisan, dan setiap titik atau secercah apapun yang memberi penerangan bagi cerita kehidupan manusia.[[13]](#footnote-14) Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai informasi mengenai “Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dalam kurun waktu 1959-1967. Upaya-upaya yang peneliti lakukan untuk mendapatkan data-data tersebut adalah mengunjungi Balai Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kota Makassar, sebagai tempat penelitian utama karena memiliki berbagai data primer mengenai objek yang diteliti.

Penelitian dilakukan selama tiga bulan yang dimulai pada bulan Mei hingga Juli tahun 2015. Pada proses penelitian, peneliti membaca dan menganalisis sejumlah arsip, diantaranya arsip pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara 1960-1964 Volume II, arsip Bantaeng 1866-1973 Volume I, arsip Selayar 1823-1973 Volume I, arsip Sidenreng Rappang (Sidrap) 1950-1978, dan beberapa arsip lainnya. Arsip-arsip tersebut berisi data mengenai aktivitas Front Nasional baik dalam skala nasional, daerah hingga cabang yang terletak pada daerah tingkat I dan II sesuai dengan pembagian arsip yang telah ditentukan. Selain membahas mengenai aktivitas setiap cabang dan pengurus Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara, ditemukan pula penjelasan mengenai Anggaran Dasar Rumah Tangga dan Peraturan Rumah Tangga Front Nasional pada beberapa arsip.

Peneliti juga mengumpulkan berbagai tulisan ilmiah, buku-buku, dan laporan penelitian yang relevan dengan cara mengunjungi perpustakaan sejarah FIS-UNM, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar, Perpustakaan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Perpustakaan Multimedia, serta tempat lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dari arsip dapat dipahami secara lebih baik lagi. Sumber sekunder tersebut juga dijadikan pembanding terhadap data arsip yang telah ditemukan. Oleh karena itu, maka didapatkan sumber primer dan sekunder tentang hal-hal yang menjadi fokus penelitian.

* + 1. **Kritik Sumber**

 Kritik sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otentitas dan kredibilitas sumber. Kritik merupakan produk proses ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan dan agar terhindar dari fantasi, manipulasi dan fabrikasi.[[14]](#footnote-15) Hal ini berangkat dari dasar pemikiran seorang peneliti sejarah yang tidak mudah mempercayai dan meyakini suatu sumber, sehingga akan mudah membedakan antara sumber yang benar dan yang palsu. Pada satu sumber, peneliti melakukan berbagai kritik terhadapnya. Kritik yang pertama ialah kritik eksternal, yakni usaha mendapatkan otentitas sumber dengan melakukan penelitian fisik. Otentitas mengacu pada sumber yang sezaman, jenis, ukuran, bahan, kualitas, dan lain-lainnya.[[15]](#footnote-16) Kemudian kritik yang kedua ialah kritik internal, yakni kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber, umumnya mengacu kepada isi dan dokumen sehingga bertujuan untuk memahami dengan baik dan benar isi teks suatu sumber.[[16]](#footnote-17)

* + 1. **Interpretasi**

Pada tahap ini telah ditetapkan fakta-fakta yang teruji. Fakta yang sudah dikumpulkan melalui arsip dan buku-buku, selanjutnya diinterpretasikan. Pada tahap interpretasi, subjektivitas seorang peneliti akan mulai tampak. Hal ini karena imajinasi dibutuhkan untuk menafsirkan seluruh kejadian berdasakan data-data yang telah terkumpul. Akan tetapi, sejarawan tetap harus berada di bawah bimbingan metodologi sejarah, sehingga subjektivitas dapat dieliminasi.

* + 1. **Historiografi**

Historiografi merupakan tahap akhir dalam proses penelitian sejarah. Pada tahap penulisan, peneliti menyajikan laporan hasil penelitian dari awal hingga akhir yang meliputi jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan. Pada tahap ini, fakta-fakta yang telah didapatkan penulis setelah melalui tahap-tahap sebelumnya, kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan yang memenuhi kaidah-kaidah tertentu berupa sebuah kisah sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis itu sendiri. Berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti pada tahap historiografi memaparkan mengenai latar belakang terbentuknya Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara berdasarkan beberapa arsip yang telah diperoleh, disertai dengan buku yang menjelaskan kondisi Indonesia pada masa sistem Demokrasi Parelementer dan periode awal Demokrasi Terpimpin. Selanjutnya, peneliti memaparkan berbagai macam aktivitas Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara yang sebagian besar terdapat pada arsip, namun agar penjelasan pada masalah ini semakin tajam, peneliti juga menggunakan buku yang membahas kondisi Sulawesi Selatan Tenggara dalam kurun waktu tahun 1959-1967. Terakhir, peneliti juga mengungkapkan detik-detik pembubaran Front Nasional yang dimulai dengan kondisi politik Indonesia yang tidak menentu pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 hingga dikeluarkannya surat pembekuan terhadap Front Nasional dan seluruh pengurusnya yang ada di daerah.

|  |
| --- |
| **BAB II****SULAWESI SELATAN TENGGARA DAN PEMBENTUKAN FRONT NASIONAL DAERAH SULAWESI SELATAN TENGGARA** |

1. **Gambaran Umum Wilayah Sulawesi Selatan Tenggara**

Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Presiden Soekarno menjadi penanda terhadap hadirnya suatu negara dan bangsa yang baru. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga permasalahan mengenai pembagian wilayah menjadi keunikan tersendiri. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI melanjutkan sidang pleno dengan pembahasan terhadap pembagian wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan hasil rapat panitia khusus yang dibentuk oleh Presiden Soekarno, maka diputuskan bahwa wilayah Indonesia terbagi ke dalam delapan Provinsi yakni Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

Tatanan wilayah Indonesia dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan terutama selama masa Republik Indonesia Serikat diberlakukan. Akan tetapi, hal ini tidak berlangsung lama, karena sejak Presiden Soekarno kembali memimpin pemerintahan dan negara, sejak saat itu pula wilayah Indonesia kembali secara utuh, yakni yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Pembentukan daerah-daerah otonomi dipilih sebagai langkah taktis dalam menghadapi persoalan kewilayahan. Kedelapan Provinsi yang telah ada dimekarkan menjadi beberapa wilayah bagian atau yang disebut sebagai daerah tingkat I. Tujuannya ialah, agar daerah tingkat I mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta mengkoordinir dan mengawasi daerah-daerah tingkat II yang telah ada. Terkhusus untuk Provinsi Sulawesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 47 Tahun 1960 (LN. Tahun 1960 No. 151), maka ditetapkan pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara yang meliputi 2 kotapraja dan 25 daearah tingkat II dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Kota Makassar.[[17]](#footnote-18)

18

PERPU yang ditetapkan pada tanggal 13 Desember 1960 dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 1961 tersebut bertujuan untuk melancarkan jalannya pemerintahan di daerah-daerah tingkat II yang telah dibentuk di Sulawesi.[[18]](#footnote-19) Hal ini juga dilakukan agar tercapai bentuk susunan ketatanegaraan yang seragam di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, secara teratur ditetapkan pula berbagai kebijakan seperti pengangkatan bupati/kepala daerah tingkat II dan pembetukan DPR-GR.

Kondisi Politik

Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949 memberikan pengaruh terhadap bentuk dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Adanya kesepakatan untuk membentuk Republik Indonesia Serikat yang berada dalam pengawasan dan jangkauan pihak Belanda, merupakan bukti adanya upaya untuk memecah Indonesia yang merupakan negara kesatuan menjadi negara federal. Beberapa tahun sebelum terbentuknya RIS, Van Mook yang merupakan ahli ketatanegaraan asal Belanda telah mengungkapkan idenya mengenai otonomi daerah dan wilayah federal secara terbuka. Van Mook berpendapat, jika federasi merupakan bentuk yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia karena memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari ribuan pulau.

Ide yang dikeluarkan oleh Van Mook pada dasarnya tidak murni untuk memberikan alternatif baru dalam penataan wilayah Indonesia yang pada saat itu baru merdeka. Ide tersebut hanya dijadikan alasan, yang tujuan sesungguhnya mengembalikan Indonesia sebagai bagian dari pemerintahan Belanda. Hal tersebut terbukti dari daerah-daerah yang gencar dipengaruhinya yakni sebagaian besar merupakan wilayah di luar Pulau Jawa. Ini dilakukan untuk mengepung Indonesia yang pusat pemerintahannya terkonsentarsi di Jawa. Secara kongkrit gagasan mengenai negara federal diajukan dalam Konferensi Malino yang berlangsung pada tanggal 15-24 Juli 1946 dan menjadi dasar terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT).[[19]](#footnote-20) NIT yang pusat pemerintahannya berada di Sulawesi Selatan Tenggara diharapkan menjadi kekuatan baru yang mampu mengimbangi Jawa. Akan tetapi, harapan itu tidak terlaksana karena sambutan dari rakyat, kaum nasionalis dan sebagian bangsawan Sulawesi Selatan Tenggara yang tetap menyatakan dukungannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[20]](#footnote-21)

Pada perkembangannya, pertentangan antara kaum yang berhaluan republik dan uniteralis tidak dapat terhindarkan. Kelompok masyarakat yang tetap menolak adanya negara federal melakukan perlawanan secara fisik melalui kelompok kelaskaran yang menolak penjajahan kembali atas Indonesia dalam bentuk apapun. Perlawanan terhadap kekuasaan NIT mengalami peningkatan sejak diadakannya hubungan antara Kelaskaran Sulawesi Selatan Tenggara dengan Yogyakarta. Usaha tersebut mendapatkan restu dari Panglima Sudirman melalui Kahar Muzakkar. Setelah berakhirnya perang kemerdekaan dan NIT dinyatakan bubar, maka Sulawesi Selatan Tenggara kembali menyatakan dirinya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersamaan dengan hal tersebut, para gerilyawan yang tergabung dalam kelaskaran membentuk Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan meminta agar mereka diterima menjadi anggota APRIS Divisi (Brigade Hasanuddin) dengan Kahar Muzakkar sebagai panglimanya.[[21]](#footnote-22)

Permintaan KGSS yang ingin bergabung ke dalam APRIS terbentur dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, bahwa yang dapat menjadi anggota APRIS adalah mereka yang pernah mendapatkan pendidikan kemiliteran. Syarat tersebut mendapatkan protes dari anggota KGSS. Menanggapi protes yang diajukan oleh KGSS, Markas Besar Angkatan Darat membentuk sebuah satuan tugas di bawah komando Kolonel Alex E. Kawilarang yang saat itu menjabat sebagai Komandan Teritorium VII Wirabuana. Kesatuan tugas tersebut akhirnya mengeluarkan dekrit untuk membubarkan KGSS.[[22]](#footnote-23) Reaksi terhadap dekrit ini beragam, terdapat beberapa anggota KGSS yang menyetujuinya dan bersedia untuk mundur, namun sebagian besar anggotanya menyatakan tidak menerima. Setelah KGSS dibubarkan, para angggota yang masih menuntut untuk dimasukkan ke dalam APRIS kemudian membentuk kelompok gerakan yang dipimpinan oleh Kahar Muzakakar. Gerakan ini dikenal dengan nama Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dinilai sebagai suatu bentuk pemberontakan.

Pola gerakan yang digunakan oleh DI/TII ialah dengan bergerilya. Para anggota gerakan ini masuk dan keluar dari hutan dalam waktu-waktu tertentu disertai serangan kepada pihak musuh. Desa-desa yang berada di dekat hutan (markas DI/TII) mengalami kerugian akibat pembakaran yang dilancarkan oleh anggota DI/TII. Tidak hanya wilayah hutan yang dijadikan sasaran gerakan oleh DI/TII, namun anggota DI/TII juga menyasar daerah-daerah yang berbasis laut seperti masyarakat Bajo di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 1953, terjadi penembakan yang dilakukan oleh DI/TII kepada masyarakat Bajo yang mengakibatkan 8 orang meninggal.[[23]](#footnote-24) Selain itu, beberapa rumah penduduk juga ikut dibakar, sehingga masyarakat yang berhasil selamat akhirnya harus melarikan diri ke desa lain dengan naik perahu.

Seiring waktu, DI/TII membutuhkan massa untuk membesarkan gerakan tersebut. Oleh karenya, Kahar Muzakkar dan para anggotanya gencar memperkenalkan tujuan gerakan DI/TII kepada masyarakat. Upaya ini tidak sia-sia, sebagian masyarakat Sulawesi Selatan Tenggara menyatakan dukungannya terhadap DI/TII baik secara langsung dengan ikut aktif bergerilya, maupun tidak langsung dengan memberikan dukungan materil dan motivasi.[[24]](#footnote-25) Setelah memperoleh dukungan dan pengikut, Kahar Muzakkar juga membentuk partai politik yang dinamakan Partai Pantjasila Indonesia (PPI) yang kemudian berganti menjadi Partai Islam Revolusioner (PIR).[[25]](#footnote-26) Hal ini dimaksudkan agar DI/TII mampu menembus dunia pemerintahan. Gerakan DI/TII juga diidentikkan dengan agama Islam, karena sebagian besar yang menjadi anggota dari gerakan ini ialah ulama dan para santrinya serta menuntut berdirinya suatu negara yang sesuai dengan syariat Islam.

Belum usai permasalahan gerakan DI/TII, kondisi politik dan militer di Sulawesi Selatan Tenggara kembali bergolak dengan terbentuknya Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Pada tanggal 2 Maret 1957, Panglima untuk Indonesia Timur Kolonel HNV Samual mengumumkan keadaan darurat perang di wilayahnya, sehingga secara teoritis Kolonel HNV Samual mengambil alih semua kekuasaan sipil dari Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi hingga Maluku. Permesta menuntut adanya pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi politik, ekonomi serta sosial Indonesia yang tidak kondusif akibat sistem Demokrasi Parlementer yang tidak berjalan baik. Selain itu, anggota Permesta juga menginginkan adanya pemberian alokasi 70% dari kursi dalam Dewan Nasioanal yang direncanakan kepada wakil tingkat Provinsi, sehingga dewan tersebut pada akhirnya memperoleh status sebagai senat.[[26]](#footnote-27) Pada tahun 1958, Permesta juga bekerja sama dengan gerakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar yang bertujuan untuk menangkal pengaruh komunis di Indonesia khususnya untuk wilayah Sulawesi Selatan Tenggara.

Setelah Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin, maka perintah untuk melaksanakan MANIPOL USDEK segera disebarkan ke berbagai daerah. Selain itu, Presiden Soekarno juga mengeluarkan kebijakan politik dengan membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955, melarang pegawai negeri menjadi anggota salah satu partai politik, serta melakukan penyederhanaan partai politik sehingga Partai Masyumi dan beberapa partai lainnya yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan, akhirnya dibubarkan.[[27]](#footnote-28) Terkhusus untuk masyarakat Sulawesi Selatan, kebijakan yang berdampak langsung ialah dikeluarkannya UU No. 29 Tahun 1959 yang secara resmi membentuk daerah-daerah tingkat II di seluruh wilayah Sulawesi.

Selama berlansungnya Demokrasi Terpimpin, sistem pemerintahan Indonesia bersifat sentralistik atau satu arah. Segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno menjadi kekuatan hukum dalam pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, beberapa kebijakan tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan Tenggara, sehingga untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dilaksanakanlah Operasi Penumpasan. Operasi ini ditujukan kepada gerakan-gerakan yang dinilai dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan Operasi Guntur pimpinan Let. Kol. Andi Sose.[[28]](#footnote-29) Selanjutnya pada tahun 1963, Pemerintah Sulawesi Selatan Tenggara juga mengadakan Operasi Tumpas yang terdiri dari elemen kemiliteran seperti Staf kodam XIV, Staf Panglima Angkatan Udara, Staf Panglima Angkatan Laut, Angkatan Kepolisian dan Staf Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara.[[29]](#footnote-30) Operasi Tumpas bertujuan untuk menyelesaikan segala permasalahan revolusi dan keamanan di seluruh Indonesia bagian timur dengan menggunakan segenap alat negara dan juga melibatkan masyarakat di dalamnya. Operasi Tumpas menjadi salah satu kebijakan militer dalam rangka meredam pergolakan di wilayah Sulawesi Selatan Tenggara. Sebab lain dari berakhirnya gerakan-gerakan radikal tersebut ialah adanya bantuan dari masyarakat sipil yang anti terhadap gerakan Permesta dan DI/TII. Hal ini merupakan hasil dari upaya doktrinasi yang dilakukan pemerintah dalam mencegah tersebarnya paham radikal yang menuju pada perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Kondisi Ekonomi

Kondisi alam Sulawesi Selatan pada dasarnya tergolong sebagai wilayah yang subur. Sumber daya alam yang melimpah tersebut membuat sektor pertanian dan perkebunan dijadikan sebagai mata pencaharian utama. Beras, kopra dan beberapa bahan makanan lainnya merupakan komoditi yang mendominasi perdangan pada saat itu. Tidak berbeda jauh dengan Sulawesi Selatan, wilayah Sulawesi Tenggara juga dikenal sebagai wilayah pertanian yang subur. Hasil hutan berupa kayu rotan bahkan mampu menembus perdagangan internasional.[[30]](#footnote-31) Selain itu, beberapa daerah di Sulawesi Tenggara diketahui pula mampu menghasilkan nikel dan aspal.

Menjelang tahun 1930, pemerintah Belanda merombak sistem masyarakat tradisional dengan membentuk pegawai pemerintahan. Pegawai-pegawai pemerintah didatangkan dari luar daerah Sulawesi Tenggara, sementara yang berasal dari daerah Sulawesi Tenggara sendiri ialah mereka yang telah tamat sekolah maksimum kelas V.[[31]](#footnote-32) Pegawai-pegawai dari daerah lain seperti Jawa, Makassar, Maluku, dan lainnya memberikan pengarahan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara dalam mengelola perekonomiannya. Pembukaan jalan-jalan hingga ke daerah pelosok, melimpahnya hasil hutan, penemuan tambang nikel dan aspal serta aktivitas pelayaran yang mulai ramai membawa perkembangan di bidang ekonomi. Bagi wilayah Sulawesi Tenggara, kedatangan orang Cina juga memberikan pengaruh terhadap kondisi perekonomian. Sistem barter secara perlahan mulai menghilang yang digantikan dengan penggunaan uang sebagai alat tukar.

Berkembangnya perekonomian tidak serta-merta membebaskan Sulawesi Selatan Tenggara dari permasalahan sumber daya alam. Masih terdapat daerah yang kesulitan air dan belum memiliki sistem pengairan yang baik, sehingga beberapa daerah seperti Pare-pare, Pinrang, Soppeng, Wajo dan Bone mengalami kesulitan dalam memaksimalkan hasil pertanian.[[32]](#footnote-33) Melihat kondisi ini, maka dilakukan usaha-usaha untuk melancarkan aktivitas pertanian dengan menggalakkan kembali perbaikan dan perluasan pengairan desa yang bersiklus selama 2 kali dalam setahun. Pada saat yang sama, krisis ekonomi sedang melanda dunia. Hal ini juga berdampak bagi wilayah Sulawesi Selatan Tenggara yang telah mengenal sistem pembayaran dengan menggunakan uang. Akibat dari depresi ekonomi tersebut perdagangan menjadi macet, serta masyarakat tidak dapat menjual hasil bumi dan ternaknya. Kesulitan tersebut semakin terasa ketika pemerintah Belanda menaikkan pajak, sehingga banyak masyarakat meninggalkan kampungnya dan mengungsi ke daerah lain, namun terdapat pula masyarakat yang ditangkap dan dibuang karena tidak mampu membayar pajak.[[33]](#footnote-34)

 Sejak NIT mulai berlaku, sistem perekonomian Sulawesi Selatan Tenggara diputuskan sendiri oleh kabinet NIT yang sedang berkuasa tanpa adanya koordinasi dari pemerintah pusat Republik Indonesia lagi. Langkah awal yang dilakukan NIT ialah mengatur tata cara ekspor kopra yang menyangkut pula mengenai pengelolahan dan sistem pelayarannya. Kota Makassar kemudian dipilih sebagai pelabuhan utama perniagaan dengan menerapkan syarat, bahwa setiap perahu yang berlayar dikenakan biaya wewenang tanggungan sebesar 40 %.[[34]](#footnote-35) Terbukanya pelabuhan Makassar sebagai pusat perniagaan membuat aktivitas ekspor dan impor semakin menggeliat terutama pada kopra Sulawesi Selatan dan kayu rotan Sulawesi Tenggara. Kemajuan sektor perdangan membuat aktivitas perekonomian semakin ramai dan ikut pula memengaruhi pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, selama periode NIT, sebagian masyarakat Sulawesi Selatan Tenggara mulai memperoleh sejumlah pendapatan dari hasil berdagang.

 Kondisi perekonomian yang terlihat stabil pada masa pemerintahan NIT ternyata tidak sepenuhnya merata dan dapat dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Selatan Tenggara. Secara bersamaan, masyarakat juga merasakan pergolakan karena adanya gerakan dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam bentuk negara kesatuan. Hal tersebut membuat beberapa lahan pertanian dan perkebunan menjadi terbengkalai. Selain itu, adanya NICA yang diyakini sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda menyebabkan pemuda-pemuda yang mengatasnamakan dirinya sebagai pejuang memilih untuk masuk dan melancarkan perlawanan dari hutan yang ada di Sulawesi Selatan Tenggara. Para pemuda melakukan penyerangan dan sabotase ekonomi kepada pemerintah NIT yang dianggap sebagai negara boneka.

Masalah perekonomian mencapai puncaknya ketika gerakan radikal yang bertujuan untuk menjadikan Sulawesi Selatan Tenggara menjadi negara baru mulai bermunculan. Kampung Ambalodangge Sulawesi Tenggara dan sekitarnya dibumihanguskan oleh gerakan DI/TII.[[35]](#footnote-36) Akibat Gerakan DI/TII, masyarakat Kendari Selatan juga mengungsi ke Kota Kendari dan sekitanya. Pemberontakan DI/TII dan Permesta secara langsung memengaruhi perekonomian wilayah ini. Sejak tahun 1957, hasil pertanian, perkebunan dan aktivitas perdagangan mulai menurun akibat adanya gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh gerakan tersebut. Masyarakat merasakan ketakutan ketika ingin beraktivitas di luar rumah, karena sewaktu-waktu anggota DI/TII atau Permesta dapat mengganggunya. Olehnya itu, masyarakat lebih memilih berada di dalam rumah saja. Gerakan pemberontak juga melancarkan aksi pemboikotan jalur distribusi terhadap hasil pertanian yang akan dipasarkan. Keamanan yang tidak kondusif, membuat masyarakat tidak maksimal dalam mengelola lahan mereka.

Kahar Muzakkar juga berusaha untuk mengadakan kerjasama dengan para pedagang. Pada tahun 1963, dibentuk suatu organisasi yang bernama UNCOR (Usaha Rahasia Chusus Organisasi Revolusi).[[36]](#footnote-37) Organisasi ini dimaksudkan agar para pedagang yang bersimpati dengan gerakan DI/TII dapat menghibahkan hartanya, sehingga apa yang dicita-citakan akan semakin cepat terealisasikan. Upaya tersebut mencerminkan kesadaran pihak DI/TII terhadap ketersediaan dana yang dapat mendukung gerakannya. Menghadapi situasi yang tidak menentu di bidang keamanan, perekonomian Sulawesi Selatan Tenggara tetap diupayakan untuk stabil. Bidang perniagaan yang sejak masa pemerintahan NIT menjadi salah satu indikator kestabilan ekonomi dikelola dengan baik, sehingga aktivitas perdagangan tetap berlangsung. Bahkan, pada waktu-waktu tertentu terjadi keramaian di pelabuhan Kota Makassar yang menyebabkan banyak kapal terpaksa berlabuh di luar pelabuhan karena kapasitas yang terbatas.

1. Kondisi Sosial dan Budaya

 Penduduk Sulawesi Selatan terdiri dari empat suku yakni Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Adapun untuk wilayah Sulawesi Tenggara, secara garis besar penduduknya juga berasal dari beberapa suku seperti Suku Tolaki yang mendiami bagian daratan, Suku Muna yang mendiami Pulau Muna dan pulau-pulau di sekitarnya, Suku Buton yang mendiami Pulau Buton dan sekitarya, serta Moronene yang mendiami Pulau Kabean dan ujung barat daratan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan pusat konsentrasi wilayah, masyarakat Sulawesi Selatan Tenggara terbagi dalam dua bagian yakni daratan dan kepulauan. Pembagian tersebut secara langsung juga memengaruhi pola kehidupan sehari-hari. Mereka yang bermukim dan bermata pencaharian pada sektor kelautan lebih bersifat terbuka terhadap orang-orang dan kebudayaan asing, sedangakan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan (pedalaman) lebih bersifat tertutup dan sulit menerima pengaruh dari luar. Hubungan kekerabatannya pun masih sangat ketat seoah-olah mereka terisolasi dari pihak lain. Sikap tertutup tersebut disertai dengan perasaan solidaritas yang kuat.[[37]](#footnote-38) Kepatuhan kepada elit penguasa yang turun-temurun serta ketaatan pada tradisi menyebabkan kehidupan masyarakatnya menjadi statis.

 Kehidupan pedesaan yang sarat akan adat dan peraturan menyebabkan masyarakat Sulawesi Selatan patuh pada tata pergaulan yang telah mereka sepakati bersama. Senada dengan hal tersebut, masyarakat Sulawesi Tenggara juga mengenal adanya pelapisan masyarakat yang terdiri dari golongan bangsawan (*Anakia*), kesatria (*Toono Motuo*), rakyat biasa (*Tono Dadioo*), dan budak (*Oata*).[[38]](#footnote-39) Struktur masyarakat yang terlihat kaku tidak membuat orang yang berstatus sebagai penguasa (bangsawan) meremehkan kelas yang ada di bawahnya. Setiap masyarakat menjunjung tinggi rasa harga diri. Tidak heran, jika mereka merasa harga dirinya telah diganggu, maka akan timbul pertumpahan darah.

 Selain rasa malu, masyarakat Sulawesi Selatan Tenggara juga memandang mulia dan megutamakan nilai-nilai ilmu serta pendidikan. Leluhur Sulawesi Selatan Tenggara menekankan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan menilai tinggi unsur kecerdikan yang termasuk sebagai syarat minimal bagi seorang pemimpin. Hal inilah yang senantiasa dijadikan pedoman oleh seluruh masyarakat. Atas keyakinan terhadap pentingnya pendidikan, sejak jauh-jauh hari telah dilaksanakan aktivitas pendidikan, baik yang bersifat formal maupun non formal. Secara formal, sistem pendidikan dimulai dengan masuknya bangsa Eropa yang disertai dengan pendirian *kweekschool* yang mulanya dibangun di Kota Makassar dan berlanjut ke daerah Gowa, Bone, Pare-pare dan Luwu.[[39]](#footnote-40) Pada tahun 1908, pemerintah Belanda juga mendirikan Sekolah Anak Bumi Putra di Bau-bau. Menyusul kemudian pendirian sekolah di wilayah Kendari, Kolaka, dan Buton yang mengajarkan bahasa Indonesia (Melayu). Selain itu, dipelajari pula bahasa dan tulisan Bugis/Makassar. Memasuki tahun 1940 sekolah-sekolah formal semakin berkembang di Sulawesi Selatan Tenggara.[[40]](#footnote-41) Hal ini dapat dilihat dari perkembangan sekolah yang dibuka di daerah pedalaman.

 Sebelum bangsa Eropa mengembangkan sistem pendidikan formal, masyarakat Sulawesi Selatan lebih dahulu mengenal pendidikan dengan sistem non formal yakni pembelajaran yang dilaksanakan pada langgar-langgar dan didominasi oleh materi Agama Islam.[[41]](#footnote-42) Sama halnya dengan masyarakat Sulawesi Selatan, masayarakat Sulawesi Tenggara juga telah mengenal pendidikan sejak awal abad ke XX. Hal ini dimulai dengan sistem pendidikan tradiasional yang dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni pendidikan keterampilan di lapangan dan pendidikan yang berlandaskan ilmu agama yang disertai dengan pengajian Al-Qur’an, kemudian melebar ke ilmu kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, filsafat dan bela diri.[[42]](#footnote-43)

 Saat NIT terbentuk, kondisi pendidikan masyarakat Sulawesi Selatan Tenggara mengalami peningkatan dengan didirikannya Perguruan Swasta Sawerigading di bawah pimpinan Nurdin Syahadat yang selanjutnya menjadi cikal bakal perguruan tinggi pertama di Sulawesi Selatan Tenggara.[[43]](#footnote-44) Akan tetapi, kondisi ini tidak berlangsung lama, karena beberapa waktu kemudian Sulawesi Selatan Tenggara berada dalam masa pergolakan akibat gerakan pemberontakan Andi Aziz, DI/TII dan Permesta. Kondisi yang tidak aman menyebabkan perkembangan pendidikan menjadi tersendat.

 Agama Islam masuk di Sulawesi Tenggara pada abad ke XVI. Proses islamisasi di Sulawesi Tenggara bermula dari istana raja-raja setempat dan secara bertahap berkembang ke berbagai wilayah dan pelosok. Selanjutnya, Islam semakin berkembang, tatkala masyarakat Sulawesi Selatan yang juga telah memeluk Agama Islam mulai memasuki wilayah ini, sehingga pada abad ke XX Islam menjadi agama mayoritas penduduk Sulawesi Selatan Tenggara. Pada abad ke XIX, bangsa Eropa mulai berdatangan di wilayah Sulawesi Selatan Tenggara, yang secara bersamaan juga menjadi media penyebaran Agama Kristen. Kuantitas penduduk yang memeluk Agama Kristen memang tidak sebesar agama Islam, namun gerakan kristenisasi berjalan dengan lancar pada daerah-daerah tertentu.

 *Nederlandsche Zending Vereniging* merupakan organisasi yang bertujuan menyebarkan Agama Kristen. Gerakan zending ini juga disertai dengan pendidikan serta misi sosial lainnya. Zending dan misi Kristen melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan berhasil menarik simpati masyarakat Tana Toraja, sehingga daerah ini didominasi oleh pemeluk Agama Kristen.[[44]](#footnote-45) Beberapa tahun berikutnya, ketika orang-orang Cina mulai mengadakan perdagangan dan menetap di Sulawesi Selatan Tenggara, Agama Buddha turut pula menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat setempat.

 Telah dijelaskan bahwa Islam, Kristen dan Buddha menjadi agama yang dipeluk oleh masyarakat Sulawesi Selatan Tenggara. Akan tetapi, tidak berarti jika kepercayaan animisme dan dinamisme lenyap dari pola kehidupan masyarakat setempat. Kepercayaan animesme dan dinamisme tetap tumbuh dan dipertahankan karena masih memiliki nilai kesakralahan yang tinggi. Beberapa kaum adat seperti masyarakat yang tinggal di Marpnene, Kajang, Karampuang, Aluk To Dolo, To Lotang dan lainnya masih ada hingga saat ini. Kaum adat tersebut sempat merasakan gangguan ketika Sulawesi Selatan Tenggara dikuasai oleh gerakan DI/TII. Gerakan DI/TII memiliki tujuan untuk menciptakan negara baru yang berpedoman kepada Agama Islam. Para ulama direkrut menjadi anggota DI/TII yang juga secara tidak langsung menyertakan santri (anak didiknya) sebagai bagian dari gerakan DI/TII. Anggota DI/TII melakukan penyerangan dan penghacuran terhadap benda-benda dan tempat yang dikeramatkan oleh kaum adat, dengan dalih jika hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.

 Memasuki masa Demokrasi Terpimpin di bawah kekuasaan Presiden Soekarno, Indonesia mulai terpengaruh satu paham baru yakni komunis-sosialisme. Ajaran komunis yang disebarkan melalui Partai Komunis Indonesia memperoleh sikap antipati dari masyarakat. PKI yang mendapatkan sentimen dari masyarakat dan ancaman dari pihak DI/TII tetap memperlihatkan eksistensinya pada pemilihan umum tahun 1955, sehingga Salawati Daud yang merupakan mantan Walikota Makassar yang juga berasal dari Partai Komunis Indonesia berhasil memperoleh suara mayoritas pada beberapa daerah di Sulawesi Selatan Tenggara dan mengantarkannya menjadi anggota DPR.[[45]](#footnote-46)

 Pergerakan Partai Komunis Indonesia di Sulawesi Selatan Tenggara memang tidak sama dengan daerah lainnya yang dengan mudah menerima paham tersebut. Gerakan DI/TII menjadi penghambat utama perkembangan PKI pada masa itu. Kahar Muzakkar menciptakan propaganda di masyarakat bahwa Jawa adalah komunis. Pada saat yang sama, orang Jawa dinilai sebagai penghalang para pejuang revolusi fisik menjadi anggota militer karena lebih diprioritaskan pada skala nasional.[[46]](#footnote-47) Menambah citra negatif bagi PKI, Kahar Muzakkar dan pendukungnya juga menyebut prajurit TNI yang melakukan perlawanan terhadap gerakannya adalah “Tentara Djawa Komunis”.[[47]](#footnote-48) Hal ini kemudian semakin mencapai klimaksanya, ketika DI/TII mengidentikkan komunis sebagai paham yang anti agama. Selain itu, PKI juga dipersulit dengan adanya Permesta yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan Tenggara. Permesta bertujuan untuk meminimalisir pengaruh PKI di tingkat daerah, karena menganggap bahwa PKI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kekacauan politik dan ketidakamanan Indonesia selama masa Demokrasi Parlementer berlangsung.

 Saat DI/TII, Permesta dan beberapa partai Islam mulai tidak mendominasi lagi, PKI secara perlahan mendapatkan perhatian dari masyarakat Sulawesi Selatan Tenggara. Terlebih lagi, PKI yang memusatkan aktivitas-aktivitasnya pada sektor pertanian. Langkah ini menjadi berpengaruh, sebab selama pergolakan yang terjadi di Sulawesi Selatan Tenggara akibat DI/TII dan Permesta, sektor pertanian menjadi tidak terurus. *Land reform* dengan dasar Undang-Undang Pokok Agraria yang didengung-dengungkan oleh PKI menarik perhatian para petani karena menuntut adanya pemberian tanah bagi para petani miskin.[[48]](#footnote-49) Akan tetapi, isu ini tidak memberikan solusi kongkrit terhadap penyelesaian permasalahan pertanian, malah menghasilkan konflik baru antara para petani dengan kaum pemilik tanah (bangsawan) yang dengan jelas tidak akan memberikan tanahnya dengan mudah. PKI sebagai partai yang menaungi beberapa organisasi kepemudaan dan budaya, juga mengambil peran pada perkembangan pemberantasan buta huruf Sulawesi Selatan Tenggara. PKI mendirikan Badan Pendidik Rakyat (BPR) yang setingkat dengan SMP serta mengadakan kursus-kursus politik yang bertujuan untuk menggalang dukungan terhadap seluruh aktivitas PKI.[[49]](#footnote-50) Setelah menempuh berbagai cara, PKI akhirnya mulai mendapatkan dukungan dari masyarakat Sulawesi Selatan Tenggara, namun hal ini tidak berlangsung lama karena setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, banyak anggota PKI yang mengalami kekerasan dan sentimen sosial dari masyarakat.

1. **Terbentuknya Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.**

Pada masa sistem Demokrasi Parlementer, eskalasi politik terus meningkat. Hal ini tercermin dari banyaknya mosi tidak percaya yang dilakukan oleh para anggota DPR, sehingga terjadi pergantian kabinet secara cepat dan tidak terarah. Suasana yang tidak kondusif tersebut berpengaruh langsung terhadap derah-daerah di Indonesia. Berbagai daerah mulai menyampaikan keberatannya terhadap sikap-sikap yang diambil oleh para elit politik pada saat itu. Beberapa pihak juga berpendapat, jika sistem Demokrasi Parlementer hanya didasarkan atas asumsi yang tidak relevan dan tidak menghiraukan nilai-nilai politik masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, perubahan dalam sistem politik dan konstitusional harus segera dilaksanakan dan bersifat menyeluruh.[[50]](#footnote-51)

Sulawesi Selatan Tenggara adalah salah satu daerah yang mengkritik berbagai kebijakan kabinet-kebinet yang sedang berkuasa. Pada tahun 1950 muncul pemberontakan Andi Aziz yang yang merupakan mantan ajudan Presiden NIT di Makassar. Andi Azis secara terang-terangan melakukan protes terhadap pemerintah Indonesia yang mengambil kebijakan untuk mengikutsertakan anggota TNI dalam operasi yang dilaksanakan oleh APRIS di Kota Makassar. Protes tersebut ditindak lanjuti dengan membentuk sebuah kelompok baru yang dinamakan “Pasukan Bebas”.[[51]](#footnote-52) Pasukan ini terdiri dari para bekas KNIL yang merasa akan tergeser kedudukannya di Kota Makassar setelah pasukan APRIS datang menjalankan tugasnya.

Tidak lama setelah pemberontakan Andi Aziz berhasil dipatahkan, Sulawesi Selatan Tenggara kembali berada dalam situasi yang bergolak. DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar dan beberapa perwira militer yang tergabung dalam Permesta muncul sebagai gerakan radikal yang menuntut otonomi yang lebih besar dari Jakarta. Secara khusus, gerakan Permesta di Sulawesi Selatan Tenggara juga bertujuan untuk menghalau berkembanganya PKI di daerah. Pemberontakan yang terjadi di Sulawesi Selatan Tenggara hanyalah sebagian kecil dari berbagai kritik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kabinet Demokrasi Parlementer yang sedang memerintah. Pada wilayah lain di Indonesia, juga terjadi hal yang sama.

Kondisi di berbagi daerah yang bergolak sepanjang dekade tahun 1950 membuat Presiden Soekarno mulai mengambil sikap tegas terhadap permasalahan ini. Keresahan terhadap sistem Demokrasi Parlementer sempat diungkapkan langsung oleh Presiden di Istana Negara. Presiden Soekarno berpendapat, jika Indonesia harus melakukan perubahan secara fundamental terhadap sistem ketatanegaraannya karena sistem yang selama ini dijalankan tidak cocok untuk diterapkan dan menimbulkan banyak permasalahan. Pada saat yang bersamaan, Presiden Soekarno mengungkapkan perlunya pembentukan Dewan Nasional yang bertugas menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan sosial yang ada di masyarakat serta sebagai penasehat pemeritah dalam mengambil setiap keputusan. Presiden Soekarno juga mengiginkan terbentuknya kabinet kaki empat yakni kabinet yang terdiri dari wakil-wakil PNI, PKI, Masyumi, NU, dan beberapa wakil partai kecil lainnya.

Melengkapi Konsepsi Presiden yang sebagian besar merupakan kebijakan politik, Presiden Soekarno kemudian memutuskan untuk menempuh langkah militer. Pada bulan Maret 1957, diberlakukan UUKB (Undang-Undang Keadaan Bahaya) yang berarti pihak militer diberikan wewenang khusus untuk mengamankan negara.[[52]](#footnote-53) Tidak berhenti sampai disitu, Presiden Soekarno kembali menghadapi permasalahan terkait Dewan Konstituante yang belum mampu menyusun Undang Undang Dasar baru. Sejak terpilihnya pada tahun 1955, Dewan Konstituante selalu terbentur pada permasalahan mengenai dasar negara Indonesia yang harus diterapkan.

Kegagalan Dewan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar baru membuat Presiden Soekarno mengambil suatu langkah sebagai penyelamatan negara. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan dekrit sebagai penanda berakhirnya sistem Demokrasi Parelementer di Indonesia. Dekrit tersebut berupa ketetapan yang berisikan bahwa Dewan Konstituante dibubarkan, Undang-Undang Dasar 1945 kembali sebagai dasar Konstitusi Republik Indonesia, dan pembentukan DPRS, MPRS, serta DPAS. Dekrit ini tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat. Banyak pihak yang tidak setuju dan mempertanyakan alasan mengapa dekrit dipilih sebagai solusi atas masalah yang ada. Menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat, Presiden Soekarno memaparkan alasannya dalam pidato yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dijadikan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Manifesto Politik yang berisikan 5 prinsip utama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialime Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Secara sederhana, butir-butir prinsip tersebut dikenal dengan sebutan MANIPOL USDEK.

Presiden Soekarno sejak awal merupakan pemimpin negara yang meletakkan tumpuannya pada kekuatan massa atau masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat ketika mengambil keputusan untuk membentuk Front Nasional. Front Nasional merupakan organisasi berbasis massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti partai politik dan golongan fungsional. Front Nasional selalu diasosiasikan sebagai organisasi lintas golongan, kepartaian dan ideologi yang bertujuan menyelesaikan revolusi nasional Indonesia, pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, serta mengembalikan Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih menarik lagi, tatkala Front Nasional dikonotasikan sebagai “jembatan pemersatu” antara ABRI, PKI dan kalangan agamawan yang diketahui memiliki pola hubungan yang dinamis. Terlihat dengan jelas, jika Front Nasional dikemudian hari dijadikan sebagai alat dan sarana indoktrinasi paham nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme) yang dikampanyekan oleh Presiden Soekarno sebagai paham yang mencirikan keindonesiaan.

Secara legalitas Front Nasional berdiri setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1959 Tanggal 31 Desember 1959. Atas dasar keputusan tersebut, maka secara serentak Front Nasional juga dibentuk di berbagai derah. Front Nasional tersebar di 17 Provinsi yang saat itu telah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Sulawesi Selatan Tenggara. Pengurus Front Nasional dari pusat sampai ke ranting diputuskan oleh Presiden Soekarno selaku pemimpin tertinggi Front Nasional setelah bermusyawarah dengan golongan-golangan dan unsur yang bersangkutan.[[53]](#footnote-54) Tindakan taktis yang diambil oleh Presiden Soekarno dalam rangka membentuk Pengurus Daerah Front Nasional ialah segera meresmikan Panitian Persiapan Daerah Front Nasional. Panitia tersebut disusun secara bersama-sama oleh Pengurus Besar Front Nasional sebagai wakil resmi Presiden Soekarno yang juga melibatkan gubernur, Kodam dan tokoh masyarakat setempat. Panitia persiapan daerah terdiri dari golongan karya sebanyak tiga orang, perseorangan tiga orang serta utusan partai politik tiga orang.[[54]](#footnote-55) Bagi wakil partai politik ialah partai yang telah memenuhi syarat yakni sesuai dengan Pen. Pres. 7/60 dan Pen Pres 13/60.

Orang-orang yang terpilih sebagai anggota Panitia Persiapan Daerah Front Nasional bertugas mengundang wakil-wakil partai, golongan karya dan perseorangan yang telah ditentukan. Para undangan tersebut diberikan kesempatan untuk mengajukan calon pengurus daerah sebanyak lima orang dan mengisi formulir yang telah disediakan. Sebelum menetapkan pengurus secara resmi, Pengurus Besar Front Nasional terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai azas dan tujuan Front Nasional dan segala sesuatu yang menyangkut prosedur pencalonannya. Setelah itu, para panitia mengumpulkan nama-nama calon yang masuk dan menyusun calon Pengurus Daerah sebanyak 2x23 calon dan mengirimkan hasilnya langsung kepada Sekertariat Pengurus Besar Front Nasional. Terakhir, panitia tersebut juga bertindak atas nama Team Pengurus Besar Front Nasional dalam membentuk Panitia Persiapan Pengurus Cabang dan Panitia Persiapan Pengurus Ranting (anak cabang) Front Nasional, apabila pengurus daerah belum terbentuk.

1. **Struktur Organisasi**

Front Nasional merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk menyelesaikan revolusi nasional Indonesia. Tujuan agar revolusi tercapai menjadi alasan yang menarik untuk diulas. Presiden Seoekarno memaknai revolusi sebagai kondisi masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera dalam segala aspek. Tidak ada lagi masyarakat yang hidup bermewah-mewahan di satu sisi, dan hidup menderita karena kemiskinan di sisi lainnya. Seluruh masyarakat harus dapat hidup dengan damai dan merata tanpa adanya sekat. Akan tetapi, hingga beberapa tahun Indonesia merdeka, revolusi yang dimaksud hanya sebatas dalam impian dan belum dapat terealisasikan. Oleh karenanya, Front Nasioanal diharapkan dapat mewujudkan revolusi secara menyeluruh dengan sistem organisasi yang terstruktur.

Secara organisasi, Front Nasional bersifat vertikal yang masing-masing anggotanya memiliki ranah kerja tersendiri. Front Nasional terdiri dari dua kepengurusan yakni Pengurus Besar Front Nasional (PBFN) dan Pengurus Daerah Front Nasional (PDFN). Pengurus Besar Front Nasional ialah pengurus yang bertempat di pusat pemerintahan dan menaungi seluruh pengurus daerah yang ada di Indonesia. Pengurus Besar Front Nasional berbentuk dewan yang terdiri dari tiga unsur yakni golongan politik, golongan karya, dan wakil perseorangan yang jumlahnya minimal 37 orang. Selanjutnya, Pengurus Besar membentuk pengurus harian yang bertugas untuk melaksanakan program harian sebanyak 11 orang.

Pimpinan tertinggi Front Nasional berada di tangan Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan Kepala Negara Republik Indonesia. Presiden Soekarno juga membentuk suatu sekretariat yang bertujuan untuk mengefektifkan organisasi ini. Sekertariat dipimpin oleh seorang sekertaris jendral yang dibantu oleh beberapa orang sekertaris. Diantara sekertaris tersebut, ada yang ditetapkan sebagai wakil sekertaris jendral. Kedua jabatan tersebut ditentukan dan dipilih langsung oleh Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Tertinggi Front Nasional atas usulan pengurus harian. Bersamaan dengan itu, sekertaris jendral dan wakilnya juga dimasukkan sebagai Pengurus Besar Front Nasional.

Pada pembagian ranah kerja, masing-masing pengurus sekertariat ditempatkan pada beberapa bagian dengan tugas yang berbeda. Bagian-bagian tersebut ialah bagian khusus yang berhubungan dengan urusan menyusun dan membina potensi nasional untuk pembebasan Irian Barat dan merencanakan aksi-aksi serta tindakan-tindakan untuk membebaskan Irian Barat. Bagian organisasi betugas untuk mengurus, menertibkan, menyusun, dan membina keorganisasian Front Nasional serta memelihara hubungan organisasi baik daerah, cabang, maupun ranting. Bagian indoktrinasi dan propaganda mengemban tugas sebagai pembina dan penggelora massa melalui pers, radio, penerbitan, terjemahan-terjemahan (tentang azas, tujuan, dan program Front Nasional) serta indoktrinasi mengenai dasar filsafat negara (Pancasila, MPRS I dan II). Bagian kesatuan aksi bertugas untuk melatih, menggunakan dan menggerakkan para anggota pelopor sesuai dengan kerjanya masing-masing dan mengkoordinasi kesatuan aksi, guna melaksanakan ketetapan MPRS I dan II. Bagian penilaian dan pengawasan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kerja Front Nasional. Selain itu, bagian ini juga menilai hasil-hasil laporan serta menyimpulkannya untuk dibuat tuntunan-tuntunan perbaikan kerja Front Nasional.

Setelah penyusunan Pengurus Besar Front Nasional selesai, selanjutnya disusun pula Pengurus Daerah Front Nasional. Keputusan untuk membentuk pengurus daerah tertuang dalam Kepetususan Presiden No. 2, 3, dan 4 Tahun 1961. Pengurus Daerah Front Nasional adalah orang-orang yang bertugas untuk menjalankan kepengurusan di daerah tertentu atau di masing-masing daerah tingkat I. Pengurus Daerah Front Nasional juga berbentuk dewan yang terdiri dari 19 hingga 23 orang serta sebanyak 9 orang yang betugas sebagai pengurus harian. Pengurus harian tersebut dijalankan oleh seorang ketua dan beberapa wakil ketua disertai sekertariatnya.

Sulawesi Selatan Tenggara adalah salah satu kepengurusan daerah yang memiliki dewan pengurus yang mencapai 23 orang atau batas maksimal anggota yang telah ditentukan sebelumnya.[[55]](#footnote-56) Para Pengurus Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara tersebut terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Perwakilan dari angkatan bersenjata merupakan yang terbanyak dengan jumlah 4 orang yakni M. Jasin Limpo, H. Moesoe Dg. Sipaso, Kol. A. Rivai dan Abdul Manik Mainudin. Adapun golongan partai diwakili oleh 6 orang yang masing-masing terdiri dari Partai Murba (Moh. Rini Amin Daud), PNI (M. Sahid), NU (Abdullah Jusuf), Partindo (Andi Arif), PSII (Sofjan Sunari) dan PKI (Aminuddin Muchlis). Pada perwakilan golongan, mencakup beberapa profesi seperti wartawan (H. A. Massiara), buruh (Ludin S dan Muh. Adam), petani (Abdu Madjo), veteran (M. Saleh Lawa dan Ismail Badu), angkatan 45 (Palengkey Dg. Lagu dan Sjamsul Kamar), dan Front Pemuda (Sulaiman Indra Hardjo). Organisasi ini mendapat pula dukungan dari ulama dan kaum perempuan dengan ikut bergabungnya Hamusta Ibrahim dan Ny. Sikado Dg. Nyai (Anggota Dewan) dalam kepengurusan. Dua tempat terakhir diisi oleh perwakilan perorangan yakni Salombe C, dan M.K. Mangiri B.A. Susunan Pengurus Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara ialah sebagai berikut:

Ketua dan Wakil Ketua

* Kol. A. Rivai Ketua
* Abdul Manik Mainudin Wakil Ketua
* M. Sahid Wakil Ketua
* Abdullah Jusuf Wakil Ketua
* Aminuddin Muchlis Wakil Ketua

Pengurus Harian

* Kol. Rivai
* Abdul Manik Mainudin
* M. Sahid
* Abdullah Jusuf
* Aminuddin Muchlis
* Moh. Adam
* M. Jasin Limpo
* Andi Arief
* Hamusta Ibrahim

Sekertariat

* Sofjan Sunari Sekertaris
* Ludin S Wakil Sekertaris
* Sulaiman Indra Hardjo Wakil Sekertaris
* M. Saleh Lawa Wakil Sekertaris
* Ny. Sikado Dg. Nyai Wakil Sekertaris

Kepengurusan Front Nasional tidak berhenti sampai pada pengurus berskala daerah tingkat I saja, melainkan kepengurusannya terus berlanjut hingga pada elemen pemerintahan terkecil. Setelah kepengurusan daerah tingkat I resmi terbentuk, kemudian dibentuk pula pengurus cabang yang berada pada setiap daerah tingkat II.[[56]](#footnote-57) Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, pengurus cabang pada setiap daerah minimal memiliki 11 orang dan maksimal berjumlah 17 orang yang dicatat sebagai anggota dewan. Melengkapi tugas kepengurusan, 7 orang diantaranya ditempatkan dalam pengurus harian yang juga dipimpin oleh ketua dan beberapa orang wakil ketua. Selebihnya menempati posisi kesekertariatan.[[57]](#footnote-58)

Garda akhir kepengurusan Front Nasional dipegang oleh pengurus ranting atau anak cabang pada setiap kecamatan.[[58]](#footnote-59) Pengurus ranting berbentuk dewan yang mencakup sedikitnya 9 hingga 11 orang. Pengurus hariannya berjumlah 5 orang yang juga dilengkapi dengan pengurus kesekertariatan di dalamnya. Struktur pengurus daerah sampai pada ranting-rantingnya disesuaikan dengan pengurus besar yang ada di pusat. Pengurus ranting merupakan kepengurusan yang paling dekat dengan masyarakat secara sosial, sehingga banyak berkontribusi terhadap jalannya program-program Front Nasional.

Pada tahun 1963 telah terbentuk pengurus anak cabang/ranting Front Nasional di Kecamatan Palangga, Tamalate, Bontonompo, dan Bajeng.[[59]](#footnote-60) Anggota Pengurus Ranting Front Nasional Kecamatan Palangga terdiri dari Desa Kandjilo, Pattung, Likuloe, Paku, Bontona Songkolo, Barombong, Moncobalang, Palangga, Perangbanoa, Tetebatu, Tamalalang, Kundjungmange, Biringbalang, Kalukuang, dan Taeng. Adapun untuk Kecamatan Tamalate ialah Desa Jongaya, Balangbaru, Pabangiang, Paccinongan, Samata, Mangasa, Gunungsari, Mappala dan Katangka. Selanjutnya, yang termasuk dalam Pengurus Ranting Front Nasional Kecamatan Bontonompo adalah Desa Bontolangkasa, Pabundukang, Kaballekang, Bontobiraeng, Barembeng, Allu, dan Tanrara. Pada Kecamatan Bajeng ialah Desa Mandalle, Bontomaero, Gentungang, Bontoala, Bontotangga, Kalobajeng, dan Mandjalling.

Front Nasional sebagai organisasi berbasis massa sejatinya tidak hanya berfokus pada pembentukan pengurus, melainkan juga berupaya menghimpun sebanyak-banyaknya anggota. Pada Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara, anggota diperoleh dari perekrutan pengurus secara langsung, ataupun melalui peleburan beberapa organisasi masyarakat yang memiliki azas dan tujuan yang sama dengan Front Nasional. Pada tanggal 10 Januari tahun 1962, Persaudaraan Keluarga Sulawesi (PKS) menyampaikan seruan kepada para Pimpinan Perwakilan Wilayah (Cabang) PKS, Pimpinan Organisasi-organisasi Masyarakat Sulawesi, dan masyarakat Sulawesi agar mendaftarkan dirinya menjadi anggota Front Nasional baik secara organisasi maupun perseorangan.[[60]](#footnote-61) Hal tersebut dapat dilakukan melalui instansi-instansi Front Nasional yang setingkat dengan organisasi/ perseorangan yang mendaftar menjadi anggota.

Front Nasional sebagai penggerak massa memiliki tiga rangkaian keanggotaan. Pertama, anggota pengurus, ialah pimpinan-pimpinan rakyat setempat yang bertanggung jawab atas kelancaran program Front Nasioanal yang diangkat melalui penjaringan khusus dan disahkan oleh pengurus yang setingkat lebih tinggi. Kedua, anggota pelopor, ialah pimpinan-pimpinan kelompok kerja pada khususnya dan penggerak massa yang dinamis, berinisiatif dan kreatif pada umumnya . Ketiga, anggota biasa, ialah dasar kekuatan Front Nasional yang merupakan massa gerak dan kerja serta disahkan oleh pengurus Front Nasional setempat dengan mendaftarkannya dalam buku daftar anggota. Baik anggota pengurus, pelopor, maupun biasa adalah Warga Negara Indonesia berjiwa proklamasi 17 Agustus 1945 yang telah mencapai usia 18 tahun dan menyetujui dasar serta tujuan Front Nasional.[[61]](#footnote-62)

Front Nasional ialah salah satu organisasi yang memiliki program-program kerja yang bersesuaian dengan MANIPOL USDEK. Oleh karena itu, Front Nasional membagi program kerja menjadi dua yakni program jangka panjang dan jangka pendek.[[62]](#footnote-63) Pelaksanaan program kerja harus didasarkan pada prinsip Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin yang dimaksud adalah musyawarah-musyawarah yang dilakukan oleh pengurus dengan memperhatikan aspek pemufakatan dan menjauhi perdebatan yang akan berujung pada pemungutan suara *(voting)* serta hal-hal yang mengakibatkan anggotanya terpecah belah.[[63]](#footnote-64) Pemecahan terhadap suatu masalah harus ditempuh secara demokratis atau kerakyatan, yaitu bermusyawarah dengan rakyat atau perwakilannya yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi/golongan. Kemudian, mengenai sumber keuangan Front Nasional ialah dana yang berasal dari pemerintah, uang pangkal (penyetoran awal), dan uang iuran yang dibayarkan pada setiap bulannya. Dana lain juga diperoleh dari sumbangan serta pemberian/usaha-usaha yang sah dan tidak melanggar azas Front Nasional.

**BAB III**

**KEGIATAN AWAL FRONT NASIONAL DAERAH SULAWESI SELATAN TENGGARA HINGGA TAHUN 1965**

1. **Bidang Sosial**

Sejak resmi dibentuk pada akhir tahun 1959, Front Nasional merupakan salah satu organisasi progresif yang pernah digagas oleh Presiden Soekarno. Tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, Front Nasional telah memiliki anggota dengan jumlah besar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain atas keinginan sendiri, anggota Front Nasional juga diperoleh dari peleburan organisai lain seperti yang dilakukan oleh Departemen Pengerahan Tenaga Rakyat. Berdasarkan telegram Menteri Petera, maka Departemen Pengerahan Tenaga Rakyat di seluruh daerah dileburkan ke dalam Front Nasional dan seluruh kegiatan pengerahan tenaga rakyat akan menjadi tanggung jawab Front Nasional.[[64]](#footnote-65) Jumlah anggota yang besar, menjadikan Front Nasional sebagai salah satu ujung tombak pengerahan massa terhadap peristiwa-peristiwa penting yang ada di Indonesia seperti Konfrontasi Militer Perebutan Irian Barat dan Operasi Dwikora Mengganyang Malaysia.

Menjelang akhir tahun 1950, masalah Irian Barat semakin menjadi pembahasan utama di kalangan petinggi negara. Tarik ulur antara pemerintah Indonesia, Belanda dan kalangan internasional (PBB) membuat masalah Irian Barat menjadi tidak jelas muaranya. Gerah dengan situasi ini, maka operasi militer menjadi pilihan terakhir. Setelah memutuskan untuk mengambil langkah militer, tidak berarti permasalahan Irian Barat menjadi tugas ABRI semata. Sebagian besar masyarakat juga berpartisipasi dengan menunjukkan antusiasnya dalam mendukung upaya pembebasan Irian Barat. Front Nasional Pembebasan Irian Barat kemudian dibentuk untuk mengkoordinar kekuatan militer yang didukung oleh masyarakat sipil tersebut. Pada awalnya, Front Nasional Pembebasan Irian Barat dijadikan satu-satunya organisasi yang diperbolehkan untuk mewadahi masyarakat yang ingin terlibat dalam pembebasan Irian Barat. Bahkan, Gubernur Sulawesi melarangan adanya organisasi lain yang mengadakan kegiatan-kegiatan dalam upaya pembebabasan Irian Barat kecuali yang tergabung dalam Front Nasional Pembebasan Irian Barat.[[65]](#footnote-66) Akan tetapi, melihat animo masyarakat yang semakin meningkat, Front Pembebasan Irian Barat kemudian diperluas dengan membentukan Front Nasional yang dilengkapi dengan ketatalaksanaan yang lebih terarah.

53

Presiden Soekarno menunjukkan kebulatan tekadnya memilih tindakan militer, dengan mengeluarkan Trikora (Trikomando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961. Trikora tersebut berisi 1) gagalkanlah pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial, 2) kibarkanlah sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia, 3) bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Pada tanggal 2 Januari 1962, dibentuklah Komando Mandala pimpinan Mayjen Soeharto yang bertujuan untuk mengorganisai penyerbuan ke wilayah Irian Barat. Komando Mandala kemudian melakukan langkah-langkah penting, diantaranya merencanakan, mempersiapkan dan melaksankan operasi militer serta mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat.[[66]](#footnote-67)

Pada peristiwa Konfrontasi Militer Perebutan Irian Barat, Front Nasional mempunyai tugas yang sangat penting, yakni menjadi wadah dalam merekrut dan memobilisasi para relawan yang akan ikut dalam operasi pembebasan tersebut. Secara resmi, Front Nasional juga mulai membuka pendaftaran tenaga sukarela untuk pembebasan Irian Barat berdasarkan instruksi langsung dari Pengurus Besar Front Nasional.[[67]](#footnote-68) Instruksi ini kemudian disebarkan ke seluruh pengurus Front Nasional yang ada di daerah, cabang dan ranting.

Beberapa bulan setelah instruksi tersebut dikeluarkan, Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara mulai melakukan persiapan perekrutan sukarelawan pembebasan Irian Barat. Pada tanggal 1 Maret 1962, Sekertaris Pengurus Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara mengeluarkan keputusan mengenai pembentukan Staf Khusus Komando Pertahanan Sipil Front Nasional Sulawesi Selatan Tenggara yang akan mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 1962.[[68]](#footnote-69) Tujuan dari Staf Khusus Komando Pertahanan Sipil ini ialah mengkoordinir, mengatur dan memelihara kesiapan para sukarelawan yang sewaktu-waktu diperintahkan untuk melaksanakan Trikora. Keputusan Front Nasional tersebut semakin mendapatkan respon dari masyarakat setelah Panglima Daerah Militer XIV Hasanuddin memerintahkan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan Tenggara untuk bersiap-siap bergabung dalam Operasi Militer Pembebasan Irian Barat.[[69]](#footnote-70)

 Bersamaan dengan keputusan sekertaris Pengurus Daerah Front Nasional Sulawesi Selatan Tenggara, seluruh cabang Front Nasional yang terdapat di Sulawesi Selatan Tenggara juga mulai bergerak untuk merekrut para relawan. Pengurus Cabang Dati II Bantaeng misalnya, mereka membentuk Grib (Gerakan Rakyat Irian Barat) yang mengikutsertakan rakyat, pegawai, polisi, dan pelajar. Beberapa hari kemudian, para rakyat yang secara resmi telah mendaftarkan dirinya sebagai relawan diperintahkan untuk menghadap di kantor Front Nasional Cabang Dati II Bantaeng pada pukul 08.00 pagi untuk menerima instruksi dan rencana pelantikan.[[70]](#footnote-71) Setelah para relawan mendaftarkan diri dan mendapatkan pengarahan berupa latihan militer dalam jangka waktu tertentu, secara berangsur-angsur mereka dikirim ke Irian Barat untuk melaksanakan tugasnya. Persiapan ini juga didukung oleh Pengurus Cabang Front Nasional Kotapraja Makassar yang menyatakan kesediaannya untuk terus mambangkitkan semangat masyarakat Sulawesi Selatan Tenggara dan terkhusus kepada masyarakat Makassar, sehingga pemberian bantuan kepada sukarelawan baik secara materil dan non meteril dapat berlangsung dengan optimal.[[71]](#footnote-72)

 Pada waktu yang sama, PKI memanfaatkan kampanye Pembebasan Irian Barat untuk meningkatkan pengaruh dan jumlah anggotanya sendiri. Jumlah anggota PKI melalui organisasi *underbouwnya* seperti BTI, SOBSI, LEKRA, dan GERWANI semakin bertambah.[[72]](#footnote-73) Pada tahun 1962, anggota BTI telah mencapai 5,7 juta orang yang mencapai seperempat dari keseluruhan petani dewasa. Selain itu, SOBSI juga mendapatkan anggota mencapai 3,3 juta orang. Adapun GERWANI yang merupakan organisasi perempuan secara perlahan menembus angka 2 juta orang. Terakhir, LEKRA yang merupakan organisasi kebudayaan PKI, mampu merebut perhatian masyarakat sebesar 100 ribu orang. Hal inilah yang juga menyebabkan posisi PKI semakin mendominsai kepengurusan Front Nasional pusat dan beberapa kepengurusan daerah lainnya.

 Permasalahan Irian Barat pada akhirnya menjadi jelas dengan keterlibatan PBB sebagai penengah terhadap konflik ini. PBB dengan salah satu badannya yang bernama UNTEA memprakarsai peralihan kekuasaan dan referendum masyarakat Irian Barat ke Indonesia.[[73]](#footnote-74) Mulai tanggal 1 Mei 1963, wilayah Irian Barat kembali ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melengkapi keberhasilan atas kembalinya Irian Barat, Pengurus Besar Front Nasional juga menganjurkan kepada seluruh Pengurus Daerah Front Nasional untuk mempelopori perayaan Hari Pahlawan yang ke 17. Oleh karena itu, pada tanggal 2 November 1962 Pengurus Cabang Front Nasional Dati II Kendari mengadakan musyawarah persiapan sekaligus pembentukan panitia penyelenggara Hari Pahlawan di Daerah Tingkat II Kendari.[[74]](#footnote-75)

 Perayaan atas kembalinya Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi tidak dapat dilaksanakan secara berkepanjangan, karena pada saat yang sama, Indonesia sedang dilanda bencana alam dengan meletusnya Gunung Agung di Bali. Bencana ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta rusaknya infrastruktur, sehingga Presiden Soekarno, menyatakan peristiwa ini sebagai bencana nasional. Menanggapi situasi ini, Pengurus Daerah Front Nasional Sulawesi Selatan Tengggara mengeluarkan seruan tertanggal 30 Maret 1963 kepada pengurus semua tingkatan bersama anggota-anggotanya, agar secara aktif melakukan pengumpulan sumbangan. Seruan tersebut berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp. 70.000,- yang berasal dari masyarakat Bulukumba dan Barru dan langsung dikirimkan kepada Gubernur Dati I Bali.[[75]](#footnote-76)

Setelah masalah perebutan Irian Barat terselesaikan, Presiden Soekarno kembali memberikan instruksi berskala nasional untuk menentang pembentukan Negara Malaysia oleh Inggris. Gerakan tersebut bernama Operasi Dwikora Mengganyang Malaysia. Front Nasional kembali memiliki peranan penting dalam peristiwa ini. Pengurus Besar Front Nasional memerintahkan kepada seluruh pengurus Front Nasional yang tersebar di berbagai daerah untuk segera mengadakan kampanye serempak bersama dengan instansi pemerintah, masyarakat umum dan ABRI.[[76]](#footnote-77) Hal ini kemudian diperkuat dengan adanya salinan yang dikirimkan oleh Pengurus Besar Front Nasional mengenai Landasan Politik Program Kerja Komando Aksi Front Nasional Menghancurkan Malaysia yang isinya mengenai dukungan terhadap perjuangan Kalimantan Utara dalam melawan pendirian Federasi Malaysia yang dinilai sebagai penjelmaan dari neokolonialisme dan imperialisme Inggris. Ditegaskan pula, bahwa untuk melancarkan perjuangan menghancurkan Malaysia dibutuhkan integrasi yang nyata antara pemerintah dan rakyat dari pusat hingga ke daerah-daerah.

Operasi Dwikora Mengganyang Malaysia yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Soekarno mendapatkan respon dari pengurus Front Nasional di daerah. Berdasarkan konsultasi dan musyawarah yang dilakukan dengan pimpinan organisasi masyarakat, federasi buruh, federasi tani dan pemuda, maka Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara menyatakan kebulatan tekadnya untuk melaksanakan aksi tersebut. Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara juga menghimbau Pengurus Besar Front Nasional agar segera mengeluarkan petunjuk-petunjuk tentang cara-cara pelaksanaan instruksi. Tindak lanjut dari kebulatan tekad yang telah diproklamirkan pada tanggal 6 Februari 1964, adalah dikeluarkannya pengumuman yang berkaitan dengan Operasi Dwikora Mengganyang Malaysia. Isi pengumaman tersebut ialah:

Untuk melaksanakan Komando P.J.M Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang R.I./Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 16 Maret 1964 mengenai Pendaftaran/Pengerahan Sukarelawan/ Sukarelawati dalam rangka menghadapi Konfrontasi dengan apa yang disebut Malaysia, Sekertariat PDFN mengumumkan sebagai berikut:

* + - 1. Pelaksanaan pendaftaran disalurkan melalui Front Nasional dengan ketentuan-ketentuan seperti di bawah ini:
				1. Mereka jang ingin menjadi sukarelawan/sukarewati supaja mendaftarkan diri kepada Organisasi/ Djawatan/ Instansinja masing-masing.
				2. Bagi mereka yang tidak tergabung pada salah satu Organisasi/ Djawatan/ Instansi lainnja supaja mendaftarkan kepada RK2/RT2.
				3. Organisasi/ Djawatan/ Instansi/ RK/RT yang telah menerima pendaftaran dari anggota2nya meneruskan daftar tersebut kepada F.N. Daerah.
				4. F. N. Daerah meneruskan daftar tersebut kepada F.N Pusat dan Gub./K.D.H sebagai Kepala Markas daerah Pertahanan Sipil.
				5. F.N Pusat menjerahkan daftar sukarelawan/sukarelawati tsb kepada Staf Komando Operasi Tertinggi dalam hal ini ketua gabungan II.
				6. Hal2 jang harus dikemukakan pada waktu pendaftaran diri ialah: “Lihat Lampiran”.
				7. Jang dimaksud dengan Organisasi adalah Organisasi2 Politik dan Karyawan, sedangkan yang dimaksud Instansi adalah Instansi-Instansi Pemerintah dan Swasta termasuk Perusahaan2.
			2. Kebutuhan akan alat-alat untuk pendaftaran diserahkan kepada Organisasi/ Djawatan/ Instansi/ RK/RT masing2.
			3. Tjatur Tunggal Front Nasional (Panca Tunggal) setempat supaya membantu Pelaksanaan Pendaftaran tersebut.
			4. Kebijaksanaan serta ketentuan2 selanjutnya mengenai Pengerahan dan Penggunaan sukarelawan/ sukarelawati jang telah mendaftarkan diri akan diatur tersendiri oleh Komando Operasi Tertinggi. [[77]](#footnote-78)

 Pengumuman di atas kembali menampilkan Front Nasional sebagai ujung tombak pelaksanaan operasi pengerahan massa secara umum di Indonesia. Melengkapi pengumuman tersebut, Front Nasioal Daerah Sulawesi Selatan Tenggara juga membentuk panitia Kesatua Aksi Front Nasional Menghancurkan Malaysia yang terdiri dari M. Saleh Lawan sebagai ketua, Luddin S sebagai sekertaris, dan sebagai anggotanya ialah A.M Bahtiar, A. Wahab, A. Karim Zakar, M. Laus Bastari, dan Kapt. Kasim.[[78]](#footnote-79) Kesatuan Aksi ini bertujuan untuk mengurus segala keperluan yang menyangkut Operasi Dwikora Mengganyang Malaysia. Bersamaan dengan hal tersebut, Pengurus Cabang Front Nasional Dati II Soppeng juga mengadakan musyawarah horizontal antar partai dan organisasi yang ada di Dati II Soppeng yang memutuskan untuk mengadakan suatu rapat raksasa di lapangan Gasis Watansoppeng dan menyatakan dukungan penuh atas perjuangan rakyat Kalimantan Utara.[[79]](#footnote-80)

Program sosial Front Nasional tidak hanya sebatas memobilisasi massa dalam operasi-operasi skala nasional saja, lebih dari itu Front Nasional juga banyak melakukan kegiatan yang bernuansa peningkatan taraf hidup masyarakat. Salah satu kegiatannya ialah pemberantasan buta huruf yang dilakukan oleh Front Nasional Cabang Dati II Bantaeng.[[80]](#footnote-81) Hal ini dilakukan karena pada awal tahun 1960-an, presentase masyarakat Bantaeng yang buta huruf mencapai 71%. Pada pelaksanaanya, pengurus mengalami kesulitan dalam memberantas buta huruf terutama terhadap masyarakat yang hidup di daerah pesisir. Mengatasi permasalahan tersebut, maka seluruh masyarakat dianjurkan untuk mengikuti kursus P.B.H yang dilaksanakan di tiap-tiap kampung.

Front Nasional Cabang Dati II Bantaeng kemudian mengadakan *sweeping* untuk memeriksa tingkat buta huruf masyarakat pada waktu-waktu tertentu, sebagai langkah pengawasan yang bertujuan memacu semangat masyarakat dalam membaca dan menulis. Bagi masyarakat yang dinyatakan belum lolos dari buta huruf, mereka tidak akan diloloskan untuk naik haji. Setingkat di atas program pemberantasan buta huruf, anggota dan pengurus juga menaruh perhatiannya pada pembangunan sekolah rakyat.[[81]](#footnote-82) Setiap kampung dihimbau untuk memiliki satu sekolah rakyat yang pembangunannya dilakukan secara bergotong royong. Hal ini dilakukan agar minat masyarakat untuk menimbah ilmu semakin meningkat.

Selain dalam dunia pendidikan, dilaksanakan pula program kampung percobaan. Program ini diharapkan mampu menjadi pembangkit semangat masyarakat dalam mengaplikasikan tradisi gotong royong dan kebersihan. Senada dengan program pembangunan sekolah rakyat, Front Nasional kembali menerapkan sistem pengawasan dan bagi yang melanggar aturan akan mendapatkan hukuman. Kampung tersebut dapat dinyatakan sebagai kampung percobaan, jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Syarat-syaratnya ialah setiap kampung harus memiliki kantor kepala kampung, tempat rapat, sekolah rakyat, koperasi RT/RK, lumbung desa, lapangan olah raga, dan mesjid.

Pelaksanaan program pemberantasan buta huruf, sekolah rakyat dan kampung percobaan membuat Front Nasional semakin mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Apresiasi ini kemudian diperlihatkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan Upacara Kemerdekaan Indonesia dan Peringatan Dasawarsa Konferensi Asia Afika ke I. Peringatan tersebut dipersiapkan dengan baik sesuai Instruksi Sekeratis Jendral Front Nasional yang mengandung perintah penyuksesan serta pedoman pelaksanaan acara Peringatan Dasawarsa Konferensi Asia Afika ke I.[[82]](#footnote-83) Langkah nyatanya ialah, Front Nasional di seluruh Indonesia menggerakkan massanya untuk memperbaiki dan membersihkan setiap jalanan yang ada di kampung secara gotong royong, serta melibatkan berbagai macam golongan seperti petani, mahasiswa, buruh, pegawai, ABRI, dan lain-lain.

Melanjutkan program kerja yang telah disusun sebelumnya, maka Pengurus Cabang Front Nasional Dati II Bantaeng bersama dengan sekertariat Organisasi Masyarakat Tani melaksanakan “Turba (turun ke bawah)” ke kampung Tjampaga dan sekitarnya pada tanggal 27 Agustus 1965.[[83]](#footnote-84) Program ini bertujuan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan pembentukan regu kerja percobaan. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan penjelasan mengenai program-program Front Nasional Cabang Dati II Bantaeng yang dilengkapi dengan kursus kilat tentang tata cara hidup bersih dan kursus menjahit yang dibawakan oleh pengurus wanita yang ikut dalam rombongan turba.

1. **Bidang Politik**

Tidak dapat dipungkiri jika pemilu pada tahun 1955 menghasilkan tiga kekuatan utama dalam perpolitikan nasional. PNI, Masyumi, NU, dan PKI merupakan partai yang berhasil memasukkan anggotanya ke dalam instansi kelengkapan negara, termasuk DPR dan Dewan Konstituante. Selama berlangsungnya sistem Demokrasi Parlementer, keempat partai dengan tiga ideologi yang berbeda tersebut mengalami hubungan politik yang naik dan turun. Suasana politik yang fluktuatif membuat Presiden Soekarno memutuskan untuk menghentikan sistem Demokrasi Parlementer yang dinilai tidak cocok diterapkan di Indonesia dengan mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959.

Dekrit 5 Juli 1959 yang semula dianggap sebagai penyelesaian terhadap persoalan politik yang telah lama menggerogoti DPR dan Dewan Konstituante ternyata tidak sepenuhnya benar. Setelah Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin, maka secara otomatis seluruh keputusan baik sosial, ekonomi dan politik berada pada satu sumber saja yakni Presiden Soekarno. Salah satu kebijakannya ialah menyederhakan partai politik yang telah ada. Hal ini menjadi salah satu keputusan yang kontroversi sebab beberapa partai harus rela dibubarkan, termasuk partai yang berideologi Islam.[[84]](#footnote-85) Masyumi merupakan sebagian kecil dari contoh partai yang harus berakhir riwayatnya dengan adanya keputusan ini. Partai tersebut diduga akan memberikan dampak buruk terhadap ketertiban dan keamanan nasional karena hubungannya yang baik dengan gerakan pemberontakan yang berlandaskan Islam serta keterlibatannya bersama PSI dalam PRRI.

Pada perkembangan selanjutnya, kekuatan politik Indonesia berpusat pada Presiden Soekarno, PKI dan ABRI (TNI AD). Ketiga elemen yang berbeda tersebut saling mengatur strategi guna mengamankan posisinya masing-masing. Presiden Soekarno harus bekerjasama dengan ABRI (Angkatan Darat) untuk menciptakan keamanan dan ketertiban negara dari gerakan pemberontakan. Akan tetapi, Presiden Soekarno juga berusaha untuk mengendalikan situasi, agar tidak berada dalam monopoli ABRI. Strategi yang dilakukan Presiden Soekarno selanjutnya adalah, bekerjasama dengan PKI yang pada waktu itu memiliki anggota yang cukup besar. Presiden Soekarno menilai bahwa PKI merupakan partai yang mampu mengimbangi kekuatan ABRI.[[85]](#footnote-86) Selain itu, terpilihnya PKI juga didasarkan atas pertimbangan adanya kesamaan persepsi terhadap azas nasakom.

Nasakom dan MANIPOL USDEK menjadi *tagline* nasional yang harus disebarluaskan kepada masyarakat. Penyebarluasan nasakom yang sering disebut sebagai indoktrinasi menjadi tugas instansi-instansi bentukan pemerintah termasuk Front Nasional. Front Nasional melalui pengurus daerah, cabang dan ranting dengan sigap melaksankan tugas tersebut. Paham nasakom yang senantiasa digembar-gemborkan mendapatkan ruang/wadah untuk semakin berkembang dengan terlibatnya Front Nasional.

Pengurus Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara bagian indoktrinasi dan propaganda kemudian mengadakan kegiatan-kegitan yang secara khusus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti/makna dari nasakom. Front Nasional Cabang Dati II Selayar melaksanakan program indoktrinasi pada tanggal 16-18 Juni 1963. Indoktrinasi dipusatkan pada tiga tempat yang berbeda yakni Bontosikuju, Bontotene, Bontoharu. Memanfaatkan kondisi yang ada, pengurus juga menyelipkan materi yang berkaitan dengan Front Nasional, seperti materi Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Front Nasional.[[86]](#footnote-87) Selain itu, dijelaskan pula mengenai prosedur pendaftaran anggota-anggota pelopor dan anggota biasa Front Nasional.

Sosialisai kegiatan Front Nasional kepada masyarakat luas tidak hanya melalui program indoktrinasi yang dilaksanakan di berbagai daerah, melainkan juga menggunakan media cetak dengan menerbitkan buletin yang bernama Berita Front Nasional. Buletin tersebut keluar pada setiap pertengahan bulan.[[87]](#footnote-88) Penyebarannya dilakukan ke setiap pengurus cabang, ranting, dan instansi–instansi sipil/militer baik yang dilengkapi oleh surat permintaan pengiriman ataupun tidak. Berita Front Nasional berisi penjelesan mengenai kegiatan-kegiatan Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara, karya pers dan radio, peraturan dan instruksi, aneka berita, serta pernyataan/keputusan-keputusan. Buletin juga dijadikan sarana bagi para pengurus Front Nasional dalam menyampaikan argumentasi-argumentasi atau pendapatnya mengenai situasi/kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terlihat dengan jelas bahwa Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara menyadari pentingnya media massa dalam membentuk opini masyarakat luas.

Aktivitas di bidang politik semakin menggeliat ketika pada tahun 1963, Pengurus Cabang Dati II Selayar mengadakan musyawarah horizontal dengan organisasi massa yang ada di daerah setempat. Musyawarah tersebut memutuskan untuk memberikan usulan kepada pemerintah agar kepala daerah tidak merangkap menjadi ketua DPR-GR Dati II Selayar. Syarat yang diajukan untuk bisa menjabat sebagai ketua DPR-GR ialah orang tersebut harus memiliki kepribadian dan pandangan yang berlandaskan nasakom.[[88]](#footnote-89) Diusulkan pula untuk segera menghapus S.O.B dan mencabut PERPRES tentang larangan bagi pegawai negeri golongan F dan anggota BPH untuk menjadi anggota partai politik. Usulan tersebut menunjukkan keinginan para anggota pengurus Front Nasional untuk mereorganisasi DPR-GR.

Tidak berselang lama, Pengurus Cabang Front Nasional Dati II Soppeng juga mengadakan musyawarah secara sepihak dengan beberapa organisasi dan partai politik. Musyawarah tersebut merumuskan komposisi dan calon anggota DPRG-GR Dati II Soppeng dan hasilnya dikirim kepada Kepala Daerah Tingkat II Soppeng melalui selembar surat.[[89]](#footnote-90) Aksi ini menuai kritikan dari berbagai pihak, namun Front Nasional Cabang Dati II Soppeng tetap melanjutkannya. Front Nasional Cabang Dati II Soppeng beralasan bahwa musyawarah ini sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat kondisi politik Daerah Tingkat II Soppeng yang pada saat itu tidak stabil akibat lambatnya penyusunan anggota DPR-GR oleh kepala daerah dan pihak yang berwenang. Langkah-langkah seperti ini memang banyak dilakukan, sebab Front Nasional diberikan wewenang untuk memberikan saran kepada Presiden dalam menyusun alat kelengkapan Negara serta mengawal jalannya revolusi.

 Selain sebagai penggerak massa, pendirian Front Nasional juga dimaksudkan untuk membantu Presiden dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai penyusunan daftar-daftat calon anggota DPR yang diajukan oleh partai politik. Fungsi ini mendapatkan berbagai macam tanggapan. Ada beberapa pihak yang setuju, namun lebih banyak yang mengkritiknya. Pihak-pihak yang tidak setuju berpendapat bahwa tugas untuk membantu Presiden merupakan ranah kerja dari menteri-menteri yang telah ditunjuk.[[90]](#footnote-91) Oleh karenya, posisi Front Nasional sebagai instansi yang diperbolehkan memberikan saran dan nasehat dalam penyusunan daftar-daftat calon anggota DPR adalah sebuah kejanggalan dan bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh Demokrasi Terpimpin.

 Front Nasional sebagai organisasi yang ditugaskan untuk mensosialisasikan ajaran nasokom kepada masyarakat, ternyata dijadikan “alat” untuk saling berebut pengaruh Presiden. Pengurus Besar Front Nasional yang berpusat di Jakarta secara terbuka memperlihatkan ketegangan diantara satu sama lainnya. Dua pihak yang bersiteru adalah pengurus yang berasal dari ABRI dan PKI. Perseteruan tersebut bukanlah hal yang baru, karena sejak lama kedua kubu ini memang tidak sepaham. Ketegangan semakin meningkat, tatkala jumlah pengurus pusat didominasi oleh PKI. Komposisi pimpinan, pengurus dan Sekertariat Pengurus Besar Front Nasional menempatkan PKI pada urutan teratas dan ABRI berada di bawahnya. Akan tetapi, sebagian besar Pengurus Daerah Front Nasional diketuai oleh para anggota ABRI. Pola yang sama juga terlihat dalam kabinet, wakil-wakil ABRI (Angkatan Darat) cukup banyak, namun tidak memiliki kedudukan yang mendominasi dalam proses pembuatan kebijakan.[[91]](#footnote-92) Berbanding terbalik dengan kondisi di pusat, pada tingkat daerah, semakin banyak perwira tentara yang diangkat menjadi gubernur dan bupati yang seringkali mendapatkan dukungan dari partai dan golongan fungsional daerah setempat.

 Sikap yang saling berseberang itu terus berlanjut hingga Front Nasional melaksanakan program kerja. Hal inilah yang dimanfaatkan dengan baik oleh PKI sebagai salah satu unsur keanggotaan Front Nasional. Pada perkembangannya, PKI dinilai mampu mendominasi kepengurusan pusat Front Nasional. Konsistensi dan keberpihakannya terhadap ajaran nasakom membuat PKI semakin dekat dengan Presiden Soekarno. D.N Aidit selaku petinggi PKI selalu mengagung-agungkan ajaran nasakom dalam pidato-pidatonya. PKI senantiasa menekankan bahwa, “setuju Pancasila harus setuju nasakom”, dan bersamaan dengan itu PKI juga menegaskan bahwa, “setuju nasakom harus setuju Pancasila”.[[92]](#footnote-93) Semakin jelas ketika materi-materi yang diajarkan dalam indoktrinasi didominasi oleh pembahasan sosialis dan marxis yang turut pula dibawakan oleh orang-orang PKI. Adapun materi yang bernuansa nasionalis terhitung sedikit dan dalam menyampaikan materinya, kalangan nasionalis (ABRI) tidak diberikan kebebasan. Manuver-manuver yang dilakukan oleh PKI salama bergabung di Front Nasional membuat organisasi ini diidentikkan dengan PKI.

Dominasi PKI pada kepengurusan pusat Front Nasional cukup memengaruhi Front Nasional yang ada di daerah. Ini terlihat pula pada Front Nasional yang ada di Sulawesi Selatan Tenggara, meskipun tidak tampak secara signifikan. Contohnya ialah pernyataan amanat penderitaan rakyat yang diwakili oleh Front Nasional Cabang Dati II Selayar. Amanat tersebut berisi desakan kepada pemerintah agar Andi Matja Amirullah ditarik dari jabatannya sebagai Bupati/Kepala Daerah dan Ketua DPR-GR Dati II Selayar.[[93]](#footnote-94) Penyebabnya ialah kondisi Selayar pada sektor ekonomi dan pembangunan tidak mengalami peningkatan selama berada di bawah kepemimpinannya. Akan tetapi, jika menganalisis alasan yang dikemukakan oleh pengurus Front Nasional, dapat diketahui bahwa alasan sebenarnya ialah, Andi Matja Amirullah merupakan kepala daerah yang tidak mendukung secara penuh keberadaan Front Nasional dan juga tidak menghendaki keberadaan komunis sebagai suatu unsur dari ajaran nasakom terkhusus perwakilan PKI di DPR-GR.

Keputusan untuk mendesak pemerintah agar menurunkan Andi Matja Amirullah dari jabatannya sebagai bupati tidak menjadi salah satu bukti kuat terhadap dominasi PKI dalam Pengurus Daerah Sulawesi Selatan Tenggara. Minimnya jumlah pengurus yang berasal dari PKI dan organisasi *underbouwnya*, baik yang menempati posisi pengurus daerah maupun pengurus cabang di seluruh Sulawesi Selatan Tenggara menjadi penyebab utamanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ABRI memiliki pengaruh yang kuat pada tingkat daerah. Terlebih setelah dikeluarkannya Dekrit Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) pada bulan Januari 1962 yang memutuskan bahwa Penguasa Perang Daerah (Paperda) yang banyak dipegang oleh pihak militer diberikan kewenangan untuk mengontrol kegiatan politik di wilayah mereka masing-masing, sehingga banyak surat kabar dan kegiatan PKI dilarang.[[94]](#footnote-95)

Faktor lain dari sulitnya anggota PKI mendominasi Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara ialah kondisi Sulawesi Selatan Tenggara yang dalam kurun tahun 1950 sampai 1960-an berada dalam masa bergolak akibat munculnya aksi pemberontakan oleh DI/TII dan Permesta. Kedua gerakan tersebut sangat anti terhadap komunis dan PKI. DI/TII menganggap jika orang-orang komunis dan PKI tidak percaya terhadap Tuhan, sehingga memeranginya merupakan salah satu jihad. Demikian halnya dengan Permesta yang juga menjadi rival abadi PKI. Permesta menilai bahwa PKI dengan ajaran sosialis-komunisnya tidak cocok diterapkan di Indonesia karena akan berakibat terciptanya pemerintahan yang sentralistik dan pemimpin yang otoriter.

Aksi pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII mendapatkan reaksi dari Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara, khususnya Front Nasional Cabang Dati II Tana Toraja yang mengeluarkan Gerakan Seruan Kilat Penumpasan DI/TII. Seruan tersebut juga memerintahkan masyarakat untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dalam membantu pemerintah menumpas gerakan DI/TII.[[95]](#footnote-96) Propaganda ini terus dilancarkan oleh Front Nasional Sulawesi Selatan Tenggara, khususnya Front Nasional Cabang Dati II Tana Toraja karena gerakan DI/TII telah membuat masyarakat Tana Toraja mengalami berbagai permasalahan. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh DI/TII misalnya terjadi pemaksaan untuk pindah agama kepada orang Kristen yang disertai ancaman bahwa jika mereka tidak pindah ke Agama Islam, maka mereka akan dibunuh dan rumahnya akan dibakar seperti yang terjadi pada daerah Sabura (Toraja Barat) dan Makale.[[96]](#footnote-97) Selain itu, pihak DI/TII juga memerintahkan untuk membunuh babi-babi yang ada di masyarakat dan sebagiannya lagi harus dijual.

Parkindo yang merupakan partai Kristen menyampaikan protesnya terhadap aksi ini. Parkindo mengirimkan surat protes tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Provinsi Sulawesi dan manyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan aksi yang telah melanggar hak kewarganegaraan masyarakat Tana Toraja.[[97]](#footnote-98) Pada dasarnya, perlakuan seperti ini tidak hanya dialami oleh masyarakat Tana Toraja saja, masyarakat seperti Bulukumba, Barru, Luwu, dan daerah lainnya juga merasakan kondisi tersebut dengan banyaknya rumah-rumah yang dibakar dan perampasan harta benda. Akan tetapi, adanya unsur pemaksaan agama yang dialami oleh masyarakat Tana Toraja yang mayoritas memeluk Agama Kristen membuat sikap antipati terhadap DI TII semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam rangka pembersihan unsur-unsur gerkan DI/TII, Front Nasional Cabang Tana Toraja merupakan salah satu cabang yang giat melaksanakan tugas tersebut.

Presiden Soekarno berpendapat bahwa gerakan pemberontakan merupakan aksi yang telah mencederai rasa persatuan masyarakat Indonesia. Ia juga menilai jika gerakan-gerakan tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang falsafah dan pedoman bangsa Indonesia yakni Pancasila. Oleh karena itu, Presiden Soekarno memerintahkan kepada Front Nasional untuk membentuk kader revolusi dalam skala nasional pada tahun 1964. Pembentukan kader revolusi tersebut diatur melalui pendidikan kader dengan tujuan untuk mewujudkan orang-orang politik, orang-orang golongan karya dan elemen lainnya yang berjiwa revolusioner.[[98]](#footnote-99) Pendidikan kader revolusi diikuti oleh anggota-anggota Front Nasional dari golongan politik, dan golongan karya, anggota Pengurus Front Nasional dari semua tingkatan (pengurus besar, daerah, cabang, dan ranting) yang ditunjuk oleh Dewan Harian Front Nasional setempat, dan anggota Front Nasional dari unsur perorangan yang telah disetujui. Sesungguhnya, pelaksanaan pendidikan kader merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh Presiden Soekarno dalam mewujudkan MANIPOL USDEK sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia. Selain alasan tersebut, Front Nasional juga terpilih sebagai lembaga pelaksanannya karena jumlah anggota yang besar yang menjadi jawaban atas pertanyaan mengenai dukungan masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno.

 Beberapa bulan setelah keputusan untuk membentuk kader revolusi dikeluarkan, Presiden Soekarno kembali menegaskan posisi Front Nasional sebagai organisasi yang terdiri dari berbagai elemen dan ideologi. Presiden Soekarno mengesahkan keanggotaan Front Nasional yang terdiri dari golongan politik dan karya.[[99]](#footnote-100) Keputusan ini mengatur mengenai partai-partai yang diperbolehkan bergabung dengan Front Nasional ialah partai yang sudah mendapatkan pengesahan sebelumnya. Selain itu, organisasi massa/golongan karya yang bergabung ialah organisasi yang menurut penilaian Dewan Harian Pengurus Besar Front Nasional dipandang seazas dan mampu menjalankan tujuan Front Nasional. Keputusan tersebut membuat hampir seluruh partai yang dinyatakan lolos oleh Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Penpres No. 13 Tahun 1960 menjadi bagian dari Front Nasional. Akan tetapi, pada tanggal 7 Januari 1965 Pengurus Besar Front Nasional memutuskan untuk memberhentikan sementara Partai Murba dan organisasi yang berada di bawahnya *(underbouw)* dari keanggotaan Front Nasional.[[100]](#footnote-101) Organisasi yang diberhentikan tersebut ialah Sentral Organisais Buruh Indonesia, S.B. Gula Proklamasi, Serikat Buruh Perkebunan Indonesia, Serikat Buruh Perusahaan Hotel dan Tourisme, S.B Budi Bhakti, Persatuan Rakyat Tani, Persatuan Wanita Murba, Organsasi Kebudayaan Rakyat, Pemuda Republik Rakyat Indonesia, dan Gerakan Mahasiswa Murba.[[101]](#footnote-102) Hal ini juga berlaku secara serentak di seluruh kepengurusan Front Nasional seluruh Indonesia. Presiden Soekarno beralasan jika pembekuan Partai Murba dilakukan dalam rangka pencegahan dan menghindari adanya perpecahan diantara kekuatan nasional yang progresif revolusioner.[[102]](#footnote-103) Keputusan untuk membekukan Partai Murba memang tidak mengagetkan, sebab partai ini dikenal lantang mengkritisi “penyalahgunaan” slogan nasakom yang menurutnya telah dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu.[[103]](#footnote-104) Sejak awal, Partai Murba merupakan salah satu pihak yang menjadi rival PKI dalam memperebutkan kepemimpinan golongan kiri, apalagi setelah partai ini juga mendapatkan dukungan dari Uni Soviet.[[104]](#footnote-105) Pembekuan ini juga menjadi bukti terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa Presiden Soekarno benar-benar menginginkan PKI memegang kekuasaan.

1. **Bidang Ekonomi**

Pergantian kabinet secara terus-menerus pada masa sistem Demokrasi Parlementer mengakibatkan munculnya permasalahan ekonomi. Setiap kabinet yang sedang berkuasa memiliki kebijakan tersendiri dalam mengelola masalah ekonomi, sehingga kebijakan ekonomi setiap masanya turut pula berganti-ganti. Hal ini terjadi karena masa pemerintahan suatu kabinet berjalan singkat sehingga perencanaan yang telah disusun dengan baik tidak mampu diterapkan secara maksimal.

Belajar dari masa lalu, maka Presiden Soekarno memutuskan untuk membentuk sistem ekonomi yang lebih terencana dan bersifat paten. Langkah tersebut dapat dilihat dari pembentukan Dewan Perancang Nasional yang bertujuan untuk mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan tersebut.[[105]](#footnote-106) Presiden Soekarno menjelaskan posisi Dewan Perancang Nasional sebagai salah satu “kendaraan” menuju sistem ekonomi terpimpin yang menjadi salah satu prinsip dari MANIPOL USDEK.

“Depernas diwajibkan menyusun satu pola dari pada pembangunan semesta untuk membangun satu masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila. Perencanaan, pola dan planning adalah satu syarat mutlak bagi pelaksanaan sosialisme. Planning itu nanti dalam pekerjaannya menjadilah wahananya Ekonomi Terpimpin dan Demokrasi Terpimpin, itu dua penghela ke arah sosialisme atau masyarakat adil dan makmur”[[106]](#footnote-107)

Presiden Soekarno secara terbuka sering mengungkapkan jika revolusi Indonesia belum usai. Revolusi akan terus berjalan, selama masyarakatnya belum mencapai keadilan dan kemakmuran. Menyelesaikan revolusi yang belum selesai dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur merupakan tujuan dasar dari pembentukan Front Nasional. Oleh karenanya, seluruh program-program kepengurusan Front Nasional dari tingkat pusat hingga tingkat ranting harus mengarah kepada tujuan tersebut. Pengurus daerah, cabang dan ranting berfungsi sebagai ujung tombaknya.

 Front Nasional yang merupakan organisasi massa yang banyak bergerak di bidang politik dan sosial tidak melupakan urusan ekonomi yang saat itu juga menjadi permasalahan utama bangsa Indonesia. Front Nasional beserta para kepala daerah ditugaskan untuk menjalankan gerakan gotong royong pengumpulan pangan guna memperoleh persediaan padi sebanyak 3,5 juta ton selama setahun.[[107]](#footnote-108) Target 3,5 juta ton padi yang telah ditetapkan tersebut mendorong Front Nasional Daerah Tingkat II Bantaeng untuk mengadakan rapat kerja pada tanggal 4 Desember 1962.[[108]](#footnote-109) Hasil dari rapat tersebut ialah diwajibkan kepada setiap Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan Tenggara mencapai swasembada pangan. Langkah selanjutnya yakni menginstruksikan kepada tiap-tiap kepala kampung agar mensosialisakannya kepada masyarakat. Diharapkan setelah pelaksanaan sosialisasi, secara bersama-sama masyarakat akan melaksanakan aktivitas pertaniannya (padi, jagung, kacang, dll) dengan lebih giat lagi. Dilaksanakan pula perbaikan irigasi atau sarana pengairan yang dapat memudahkan aktivitas pertanian masyarakat.

Pada tahun 1963, Pengurus Cabang Kotapraja Makassar beserta partai politik, organisasi massa, golongan karya, wakil-wakil karyawan dan buruh menginisiasi terlaksananya musyawarah lintas elemen yang disebut dengan musyawarah horizontal.[[109]](#footnote-110) Musyawarah ini kemudian memutuskan untuk mengintensifkan koperasi-koperasi. Oleh karena itu, dibentuk koperasi Dati II Kotapraja Makassar dengan melibatkan masyarakat setempat yang diwakili oleh para kepala kampung. Tercatat sebanyak 1.500 orang menjadi anggota dari koperasi tersebut.[[110]](#footnote-111) Perkembangan koperasi dapat dilihat juga dengan peresmian Pusat Koperasi Daerah Tingkat II Djeneponto yang dihadiri oleh para pegawai dan anggota utusan koperasi yang telah ada. Koperasi-koperasi tersebut difungsikan sebagai tempat penyaluran alat-alat teknis dan bahan-bahan baku produksi pertanian, perikanan, industri ringan, kerajinan tangan, dan lain-lain. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kedudukan koperasi sebagai unit ekonomi yang mudah dicapai oleh masyarakat atau produsen serta memiliki harga yang terjangkau.

Selain menggalakkan koperasi sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kesulitan ekonomi, musyawarah horizontal tersebut juga menyinggung mengenai perbaikan nasib buruh dan karyawan. Realisasi dari wacana tersebut ialah Pengurus Cabang Kotapraja Makassar mendesak pemerintah Kotapraja Makassar untuk segera membentuk panitia upah setempat yang mengikut sertakan wakil-wakil buruh/karyawan di dalamnya. Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah juga diharapkan mampu menyempurnakan jaringan-jaringan perhubungan baik darat, laut maupun udara. Perhatian maksimal terhadap *service*, pengamanan dan kelancaran transportasi sangat dibutuhkan sebab tanpa jalur transportasi yang memadai, kegiatan ekonomi akan terhambat. Secara keseluruhan, hasil musyawarah horizontal pada aspek ekonomi lebih menekankan adanya peningkatan produksi masyarakat. Peningkatan tersebut juga menjadi salah satu poin penting dalam Panca Program Front Nasional tahun 1963.

Menindak lanjuti Panca Program yang telah disusun oleh Pengurus Besar Front Nasional, maka Pengurus Daerah Front Nasional Sulawesi Selatan Tenggara mengadakan musyawarah horizontal pada tanggal 16-17 Maret 1963 di Gedung DPR-GR dengan menyertakan organisasi massa dan partai politik setempat.[[111]](#footnote-112) Musyawarah tersebut membahas mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh Pengurus Daerah Front Nasional Sulawesi Selatan Tenggara dalam melaksanakan Panca Program terutama di bidang ekonomi. Hasilnya ialah tercetusnya resolusi yang memfokuskan pada penertiban dan pengawasan sarana-sarana ekonomi seperti pelarangan terhadap pengiriman beras ke luar daerah sebelum kebutuhan beras lokal terpenuhi. Selain itu, diputuskan pula untuk menyelesaikan proyek irigasi Sa’dang dan Kalara’ serta menyediakan alat-alat meterial pertanian (pacul, traktor, pupuk, dan bibit unggul). Langkah-langkah ini diharapkan akan mampu meningkatkan produksi pertanian daerah. Kemudian, dirangcang pula proyek pembukaan areal sawah yang luas dengan melibatkan brigade pembukaan tanah yang terdiri dari orang-orang yang menganggur dan setengah menganggur. Proyek ini bertujuan agar produksi pertanian daerah dapat mengalami peningkatan.

Pada bulan Juli 1963 diadakan sidang pengurus Cabang Front Nasional Dati II Gowa yang membahas mengenai pelaksanaan pilot proyek perkebunan sayur kool di Kampung Pakatto Lompo Kecamatan Bontomarannu.[[112]](#footnote-113) Sidang tersebut selain membahas rancangan proyek, juga berhasil membentuk panitia pelaksana proyek yang terdiri dari tiga bagian yakni pengawas, penasihat, dan panitia pelaksana. Ranah pengawasan diketuai oleh M. Said yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Daerah Front Nasional Sulawesi Selatan Tenggara beserta sekertaris dan wakil sekertarisnya. Adapun untuk penasihat dijabat oleh Kepala Daerah Tingkat II Gowa. Terakhir, panitia pelaksana proyek ini diketuai oleh Andi Arif yang merupakan anggota Pengurus Daerah Front Nasional Sulawesi Selatan Tenggara.

Pada tahun yang sama, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu kebijakan yang disebut dengan Deklarasi Ekonomi. Amanat Deklarasi Ekonomi menyatakan bahwa untuk menanggulangi permasalahan ekonomi perlu terciptanya integrasi antara pemerintah dan rakyat yang terorganisasi dalam bidang administratif maupun eksekutif di pusat dan daerah. Begitu pula antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan badan-badan legislatifnya. Front Nasional berpendapat bahwa pengintegrasian tersebut akan mampu mengatasi kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat melalui pelaksanaan Panca Program Front Nasional. Salah satu poin penting dalam Panca Program Front Nasional ialah konsentrasi terhadap kenaikan produksi. Kenaikan produksi dapat dicapai dengan menempuh beberapa langkah seperti:

1. Mengutamakan produksi pertanian (termasuk peternakan, perikanan, kehutanan), perkebunan dan pertambangan untuk membangun Indonesia yang berindustri
2. Segera mempercepat penyelesaian pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria *(Land Reform)* dan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil serta mengambil tindakan tegas terhadap hal-hal yang dapat menjadi penghalangnya.
3. Menetapkan politik harga dan politik upah yang progresif guna meningkatkan daya beli masyarakat dan semangat kerja bagi tenaga-tenaga produktif serta mencegah kenaikan harga kebutuhan masyarakat.
4. Membantu kaum tani dalam menghasilkan produksi yang berkualitas dengan menyediakan bibit unggul, rabuk dan lainnya. Selain itu, dilakukan pula rehabilitasi pengairan, pemberantasan hama-hama tanaman, dan memberikan kredit kepada petani sebagai pinjaman modal.
5. Distribusi bahan-bahan pokok kebutuhan hidup rakyat seperti beras, gula, minyak tanah, minyak goreng disalurkan langsung ke koperasi-koperasi dengan bantua RT/RK secara merata dan sesegera mungkin. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya manipulasi di kalangan kaum tengkulak.
6. Penyempurnaan jaringan-jaringan perhubungan laut, udara dan darat dan mengutamakan alat-alat vital di tangan pemerintah.

Guna mengorganisir pelaksanaan Panca Program Front Nasional, maka pada awal tahun 1964 dibentuk Panitia Kerja Front Nasional Khusus Bidang Pangan. Panitia Kerja Front Nasional Khusus Bidang Pangan mulai tersebar ke seluruh pengurus yang ada di daerah, cabang dan ranting.[[113]](#footnote-114) Langkah selanjutnya ialah menempatkan panitia pangan dalam kelompok-kelompok kerja pangan yang bekerjasama dengan Departemen Kabinet Dwikora. Kelompok kerja tersebut ditugaskan untuk segera membuat program kerja disertai rencana pembiayaan, jumlah anggota yang dibutuhkan, alat-alat dan bahan yang diperlukan, sehingga kelompok ini mampu bekerja secara maksimal.

Kelompok kerja yang dimaksud ialah aparat operatif yang terdapat pada desa, kampung dan lingkungan kerja di pabrik-pabrik, djawatan, perusahaan-perusahaan negara, dan lain sebagainya. Anggota kelompok kerja selain bersyaratkan harus menjadi anggota Front Nasional, juga harus memenuhi kuota yang telah ditentukan yakni minimal terdiri dari 12 orang dan maksimal 50 orang. Kelompok kerja berkewajiban memberikan *social support* dan *social control* dalam lingkungan kerja masing-masing sehingga terciptanya efesiensi kerja. Bagian kesatuan aksi masing-masing tingkatan Front Nasional bertindak sebagai koordinator yang menyerahkan anggota-anggota pelopor kepada kelompok kerja untuk melaksanakan proyek yang telah disepakati bersama.

Instruksi mengenai pembentukan panitia kerja pangan segera direspon oleh Pengurus Cabang Front Nasional Dati II Jeneponto, sehingga pada tanggal 2 Mei 1964 secara resmi diumumkan nama-nama anggota yang termasuk dalam panitia kerja pangan untuk daerah tersebut yang dipimpin oleh Abd Kadir.[[114]](#footnote-115) Beberapa hari kemudian, panitia kerja mengadakan rapat yang menghasilkan keputusan berupa saran-saran dalam menangani permasalahan ekonomi baik kepada pemerintah Dati I Sulawesi Selatan Tenggara maupun Dati II Jeneponto. Saran-saran tersebut ialah hewan-hewan yang tidak digembalakan (berkeliaran) dan merusak tanaman akan diberi segel khusus, pemberian sanksi terhadap para penyelundup bahan pangan, dan menggalakkan penanaman terhadap tanah-tanah yang kosong (tidak bertuan).

Secara kontiniutas Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara mengupayakan terciptanya kondisi ekonomi yang sehat bagi masyarakat. Pada salah satu buletin yang bernama Berita Front Nasional Sulawesi Selatan Tenggara tertanggal 28 Agustus 1964, dituliskan bahwa untuk menanggulangi persoalan pangan, Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara membuat Crash Program yang telah dilaksanakan sejak bulan Mei 1964.[[115]](#footnote-116) Crash Program merupakan program ekonomi jangka pendek yang dilaksanakan oleh Front Nasional bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk menjadikan daerah Sulawesi Selatan Tenggara sebagai salah satu “lumbung pangan” Republik Indonesia sesuai dengan konsepsi yang telah diajukan pada Konferensi Presidium Kabinet Kerja dengan Tjatur Tungal seluruh Indonesia. Program tersebut dinilai memberikan dampak positif, sehingga diharapkan terjadinya surplus beras minimal 50.000 ton disertai jagung dan kacang-kacangan pada tahun 1965. Patokan dan starandar angka yang diberikan terhitung besar, hal ini didasarkan dengan kondisi yang ada di lapangan. Tercatat sebanyak 57,450 ha saluran telah direhabiliter. Selain itu, dilakukan pula penambahan saluran-saluran baru sebesar 25.200 ha, sehingga para pengurus optimis dengan hasil yang akan didapatkan.

Satu tahun berikutnya atau tepat pada bulan Juni 1965, Front Nasional kembali terlibat dalam kegiatan nasional di bidang pangan. Kegiatan ini bernama Musyawarah Besar Tani. Menyambut musyawarah tersebut, maka diinstruksikan agar semua pengurus daerah dan pengurus cabang Front Nasional di seluruh Indonesia untuk mengirimkan perwakilannya menghadiri Musyawarah Besar Tani. Sebelum pelaksanaan musyawarah dimulai, para anggota Front Nasional terlebih dahulu ditugaskan untuk membentuk panitia daerah Musyawarah Besar Tani yang anggotanya merupakan gabungan dari Front Nasional dan organisasi tani. Selanjutnya, membentuk sekertariat bersama organisasi massa tani di tingkat I dan II yang belum terbentuk disertai penyusunan pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekertaris.[[116]](#footnote-117) Front Nasional juga bertugas mensosialisasikan Musyawarah Besar Tani ke masyarakat umum. Oleh karena itu, berita mengenai Musyawarah Besar Tani hampir setiap harinya mengisi pemberitaan buletin dan pengumuman-pengumuman. Diadakan pula kompetisi di kalangan kaum petani di bidang peningkatan produksi, gerakan pemberantasan hama, gerakan penanggulangan banjir dan perbaikan pengairan, dan lain sebagainya.

**BAB IV**

**EKSISITENSI FRONT NASIONAL PASCA PERISTIWA GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965 HINGGA TAHUN 1967**

1. **Aktivitas Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara Pasca Peristiwa Gerakan 30 September 1965**

Setelah melaksanakan berbagai macam program yang dimulai pada tahun 1961, Front Nasional tampil sebagai “super organisasi” yang mampu melaksanakan seluruh instruksi Presiden Soekarno, baik yang berskala nasional maupun lokal. Akan tetapi, prestasi tersebut tidak membuat Front Nasional terbebas dari permasalahan. Masalah, justru datang dari internal Front Nasional sendiri. Pada tanggal 18 September 1965, Pengurus Cabang Front Nasional Dati II Tana Toraja mengirimkan sebuah surat kepada Pengurus Daerah Front Nasional Sulawesi Selatan Tenggara tentang perbaikan nasib para pegawai Front Nasional.[[117]](#footnote-118) Pada surat tersebut, dijelaskan bahwa kondisi pengurus Front Nasional Cabang Dati II Tana Toraja dan juga beberapa pengurus daerah lainnya tergolong memprihatinkan. Para pegawai hanya mendapatkan honorium sebesar Rp. 750,- per bulan tanpa adanya jaminan lain sebagaimana yang diterima oleh para pegawai negeri. Kondisi ini semakin memburuk, karena dalam waktu bersamaan perekonomian masyarakat sedang mengalami kesulitan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika pengurus lainnya juga merasakan masalah yang sama, sehingga beberapa pengurus cabang seperti Pengurus Cabang Front Nasional Dati II Gowa dan Pengurus Cabang Front Nasional Dati II Pinrang mengirimkan surat yang senada kepada Pengurus Daerah Front Nasional Sulawesi Selatan Tenggara. Masalah internal berupa pembagian honorium kepada para pengurus Front Nasional secara tidak langsung menjadi pembuka berbagai problematika yang akan dihadapi oleh Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dalam sepanjangtahun 1965.

87

Menjelang tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia dikejutkan dengan peristiwa terbunuhnya enam perwira tinggi dan satu Perwira Pertama Angkatan Darat. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban ialah Letjen Ahmad Yani, Mayjen R Soeprapto, Mayjen Harjono Mas Tirtodarmo, Mayjen Siswondo Parman, Brigjen D.I Panjaitan, dan Brigjen Soetojo Siswomiharjo. Adapun Perwira Pertama Angkatan Darat bernama Letnan Satu Pierre Andries Tendean juga turut diculik dan dibunuh karena sepintas wajahnya mirip dengan Jendral Nasution.[[118]](#footnote-119) Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama Gerakan 30 September 1965. Berbagai spekulasi tentang latar belakang dan dalang/aktor intelektual yang berada dibalik kejadian ini menyeruak dengan cepat di masyarakat. Segelintir kalangan menyebutkan bahwa peristiwa tersebut merupakan konflik internal Angkatan Darat. Perwira-perwira yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 mempunyai permasalahan, sehingga mendorong mereka melakukan pembunuhan terhadap atasannya.[[119]](#footnote-120) Akan tetapi, sebagian besar masyarakat menyudutkan PKI sebagai pihak yang harus bertanggung jawab pada peristiwa ini. PKI dinilai melaksanakan aksi tersebut sebagai tindakan pengambilalihan kekuasaan untuk mendirikan sebuah negara komunis.[[120]](#footnote-121) Selain itu, adanya kabar mengenai pembentukan dewan jendral (terdiri dari Perwira Tinggi Angkatan Darat) yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno membuat PKI bereaksi untuk mencegah hal tersebut, karena posisinya yang dekat dengan Presiden Soekarno. Kemudian, tidak sedikit pula yang berpendapat jika PKI memang takut terhadap kemungkinan adanya sebuah kudeta yang akan dilakukan oleh dewan jendral dan ingin mendahuluinya.[[121]](#footnote-122)

Tuduhan yang dialamatkan kepada PKI sebagai pelaku terhadap penculikan dan pembunuhan Perwira Tinggi Angkatan Darat tersebut membuat suhu politik pada saat itu meningkat. Masyarakat mulai bersikap antipati terhadap hal-hal yang berkaitan dengan PKI. Melihat situsai ini, Presiden Soekarno segera memerintahkan pihak militer untuk meningkatkan kesiagaan serta menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tenang dan tetap memelihara persatuan nasional, namun masyarakat sudah terlanjur gelisah. Kegelisahan masyarakat tersebut lambat laun mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno.

Situasi yang tidak kondusif tersebut membuat Front Nasional segera mengambil tindakan. Pengurus Cabang Front Nasiona Dati II Bantaeng langsung mengadakan rapat pengurus beserta seluruh pengurus organisasi politik, golongan karya dan organisasi massa lainnya pada tanggal 2 Oktober 1965.[[122]](#footnote-123) Musyawarah tersebut kemudian menghasilkan pernyataan tegas atas kesetiaan dan berdiri di belakang Pemimpin Besar Revolusi/Presiden Soekarno serta tetap setia mengamalkan ajarannya dan berpegang teguh pada panca azimat revolusi. Dipertegas pula bahwa Front Nasional tidak mengenal dan mengutuk peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang merupakan aksi penyelewengan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 6 Oktober 1965, Presiden Soekarno mengadakan Sidang Kabinet Paripurna untuk membahas situasi yang sedang terjadi dan memutuskan beberapa langkah penting dalam mengatasi permasalahan tersebut. Keesokan harinya, Front Nasional juga mengadakan Sidang Sekertariat Pengurus Besar Front Nasional untuk meninjau dan membahas hasil Sidang Kabinet Paripurna yang telah dilakukan oleh Presiden Soekarno sehari sebelumnya. Sidang tersebut memutuskan untuk memerintahkan Front Nasional di seluruh Indonesia untuk segera melakukan pembersihan dari unsur-unsur PKI.[[123]](#footnote-124) Perintah ini kemudian dijalankan oleh Pengurus Daerah Front Nasioal Sulawesi Selatan Tenggara, sehingga diputuskan untuk memberhentikan sementara anggota Front Nasional dari PKI dan organisasi massa-organisasi massanya terhitung sejak tanggal 25 Oktober 1965.[[124]](#footnote-125) Pada putusan itu, tercantum dua nama anggota yang diberhentikan yakni Sultan Dg. Bantang dari PKI dan Badawi Sitaju dari S.O.B.S.K.I. Dihimbau pula kepada seluruh Pengurus Cabang Front Nasional yang ada di Sulawesi Selatan Tenggara agar sementara waktu anggota yang berasal dari PKI dan Organisasi massanya baik yang duduk dalam panitia *land reform*, panitia kerja pangan dan sekertariat bersama organisasi massa tani dinonaktifkan.

Tindakan yang diambil untuk memberhentikan anggota PKI dari kepengurusan Front Nasional merupakan salah satu langkah penting terhadap keberlangsungan organisasi ini. Hal demikian memang tidak mengherankan, sebab Front Nasional yang sering diidentikkan dengan PKI harus berhati-hati agar tidak mendapatkan serangan langsung dari masyarakat dan pihak-pihak yang ingin melemahkan Presiden Soekarno. Pengurus Daerah Front Nasional Sulawesi Selatan Tenggara kemudian menginstruksikan kepada seluruh pengurus cabang dan ranting di wilayah Sulawesi Selatan Tenggara supaya segera menghubungi walikota/bupati/ Pimpinan ABRI dan anggota lainnya untuk merundingkan permasalahan mengenai para anggota Front Nasional yang berstatus sebagai pimpinan partai politik dan organisasi massa. Diserukan pula untuk membersihakan unsur-unsur kontra revolusioner dari tubuh Front Nasional, memperbaharui semangat anggota Front Nasional dalam melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi di segala bidang khususnya peningkatan produksi pangan, serta melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban masyarakat umum.

Pada tanggal 2 November 1965 Pengurus Daerah Front Nasional Sulawesi Selatan Tenggara menerima salinan surat yang berisi Komando Presiden Soekarno mengenai pengamanan revolusi.[[125]](#footnote-126) Komando tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran Presiden Soekarno pada jalannya revolusi dan perlawanan terhadap kolonialisme akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965. Lebih spesifik lagi, Presiden Soekarno mengungkapkan jika Gerakan 30 September 1965 menimbulkan gejala-gejala yang membahayakan dan mengancam sendi-sendi kehidupan kenegaraan di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat. Masyarakat juga diperintahkan agar tetap berada dalam kekuatan progresif revolusioner dan sebagai tindakan jangka pendeknya, dilarang keras untuk melakukan tindakan destruktif seperti rasialisme, pembakaran, pengerusakan, demonstrasi yang tidak memiliki izin, dan aksi balas dendam.

Satu hari setelah Komando Presiden Soekarno mengenai pengamanan revolusi diumumkan, Pengurus Besar Front Nasional langsung meresponnya dengan mengeluarkan instruksi kepada seluruh pengurus Front Nasional di seluruh tingkatan untuk:

Memimpin partai2 politik, Organisasi Massa dan Golongan Karya dalam kesatuan KESATUAN GERAK melakukan Komando PJM. Presiden/ Pangti ABRI/ Pemimpin Besar Revolusi tanggal 21 Oktober 1965.

Menjiapkan rentjana kerdja untuk melaksanakan komando tsb di atas dengan Pantja Tunggal setempat.

Aksi2 DILUAR Front Nasioanl supaja ditjegah dan dianggap tidak sjah untuk menghindari kesimpangsiuran jang dapat menimbulkan kesulitan2 jang tidak diinginkan.

Dalam aksi2 massa seperti jang dikomandokan itu siufatnja adalah membantu ABRI dan Pantja Tunggal.[[126]](#footnote-127)

Berdasarkan instruksi/perintah di atas, dapat dilihat kesigapan Front Nasional dalam menanggapi situasi yang tidak menguntungkan. Tetap berada di belakang dan mendukung penuh Presiden Soekarno dengan secara perlahan merapat ke ABRI diharapkan dapat memecah kebuntuan politik yang sedang terjadi. Strategi merapat ke ABRI sesungguhnya telah lama dilakukan oleh Pengurus Daerah Sulawesi Selatan Tenggara. Sejak awal hubungan antara kedua institusi ini cukup baik, sebab Front Nasional yang ada di Sulawesi Selatan Tenggara tidak terlalu terpengaruh oleh dominasi PKI seperti halnya dengan yang dialami oleh pengurus pusat. Langkah selanjutnya ialah Front Nasional segera menyusun rencana kerja komando Presiden Soekarno mengenai kesatuan gerak dengan tujuan untuk lebih meyakinkan masyarakat. Akan tetapi, Front Nasional juga berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hal ini secara jelas terlihat pada poin ketiga yang memerintahkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi-aksi yang berada di luar koridor dengan tujuan mencegah kesimpangsiuran di tegah-tengah masyarakat.

Melanjutkan instruksi yang telah dikeluarkan oleh Presiden Soekarno dan Pengurus Besar Front Nasional mengenai penanganan terhadap Gerakan 30 September 1965, Pengurus Daerah Front Nasional Sulawesi Selatan Tenggara kembali menegaskan komitmennya terhadap kelanjutan cita-cita revolusi yang telah ditetapkan. Pengurus Daerah Front Nasional Sulawesi Selatan Tenggara menginstrusikan kepada pengurus cabang, ranting, kelompok kerja, partai politik, dan organisasi massa untuk menaati dan melaksanakan dengan baik seluruh instruksi yang telah dikeluarkan. Ditekankan pula bahwa hubungan kerjasama antara Front Nasional dengan panca tungal daerah harus tetap berlangsung dengan baik sehingga pelaksanaan tugas-tugas dalam bidang pengamanan, penertiban, pembanguanan dan rehabilitasi dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.[[127]](#footnote-128) Terakhir, diperintahkan agar setiap pengurus cabang dan ranting melaporkan perkembangan daerah masing-masing dalam jangkawaktu sekali seminggu. Instruksi ini memberikan kesan jika Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara berupaya meyakinkan masyarakat kalau Front Nasional bukan salah satu organisasi massa yang berada di bawah PKI dan merupakan organisasi yang bertujuan mengayomi masyarakat.

Usaha untuk membuktikan eksistensi Front Nasional kepada masyarakat tidak berhenti pada gerakan sosial dan politik saja, namun Front Nasional juga masih terlibat dalam kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Pada bulan Desember 1965, Presiden Soekarno menetapkan keputusan untuk mengeluarkan uang rupiah baru sebagai alat tukar dan pembayaran yang sah bagi seluruh wilayah Republik Indonesia yang disertai dengan penarikan uang rupiah sebelumnya. Kebijakan moneter ini juga turut menyertakan Front Nasional sebagai organisasi yang membantu pemerintah dalam memudahkan masyarakat menukarkan uangnya. Selain ditugaskan untuk membantu penukaran uang, Front Nasional juga bertugas untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat agar kebijakan yang telah diputuskan dapat berjalan dengan baik.[[128]](#footnote-129)

Pada bulan yang sama, Pengurus Cabang Front Nasional Dati II Bantaeng kembali mengeluarkan pernyataan sebagai sikapnya terhadap pemberitaan yang menyudutkan PKI sebagai dalang dari pembunuhan beberapa Jendral Angkatan Darat di sebuah sumur yang disebut lubang buaya. Pengurus Cabang Front Nasional Dati II Bantaeng mendukung sepenuhnya Keputusan P.T Panglima Kodam XIV/Ketua Papelrada Sulawesi Selatan Tenggara tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan seluruh organisasi bawahannya *(underbouw)* yang terdapat di Sulawesi Selatan Tenggara.[[129]](#footnote-130) Menurut Pengurus Cabang Front Nasional Dati II Bantaeng, tanpa dukungan dan keberadaan PKI beserta organisasi massanya, revolusi Indonesia akan tetap berjalan dengan tetap memegang teguh pada landasan Panca Azimat Revolusi.

Senada dengan Pengurus Cabang Front Nasional Dati II Banateng, Pengurus Cabang Front Naional Dati II Pinrang juga menyatakan dukungannya terhadap perintah untuk menghilangkan unsur-unsur PKI dari kepengurusan Front Nasional. Betempat di lapangan La Sinrang, diadakan rapat akbar yang dihadiri oleh perwakilan partai politik, anggota DPR-GR, anggota-anggota Front Nasional, sukarelawan, panca tunggal, pelajar serta segenap rakyat dan Pemerintah Dati II Pinrang.[[130]](#footnote-131) Rapat akbar ini menghasilkan kesepakatan untuk segera menjalankan Keputusan Presiden No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 tentang pembubaran dan pelarangan PKI serta bebagai organisasi seazas atau oraganisasi yang bernaung di bawahnya, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dinyatakan pula, bahwa untuk kelanjutan aktivitasFront Nasional akan menunggu koordinasi langsung dari Presiden Soerkarnodan Pengurus Besar Front Nasional.

Tidak dapat pungkiri jika pembubaran dan pelarangan PKI berpengaruh pada Front Nasional yang terlanjur diidentikkan sebagai organisasi yang dekat dan bahkan didominasi oleh orang-orang PKI. Akan tetapi, situasi tersebut tidak menghalangi Front Nasional dalam melakukan aktivitasnya. Pada tanggal 5 Mei 1966, Pengurus Cabang Front Nasional Dati II Gowa tetap mengirimkan surat kepada Pimpinan PartaiKristen Indonesia (Parkindo) Cabang Dati II Gowa dalam rangka permohonan untuk turut serta dalam Front Nasional Cabang Dati II Gowa.[[131]](#footnote-132) Surat tersebut menunjukkan adanya upaya Front Nasional untuk tetap bekerjasama dengan partai politik sehingga Front Nasional masih dapat eksis. Wujud kerjasama antar kedua belah pihak ialah pengiriman laporan notulen rapat pembentukan Parkindo Cabang Dati II Gowa, susunan pengurus cabang/ranting dan daftar jumlah anggota yang telah terdaftar kepada Pengurus Cabang Front Nasional Dati II Gowa beberapa hari setelah surat permintaan diajukan.

Beberapa bulan kemudian atau tepatnya tanggal 13 Juni 1966, Front Nasional Cabang Dati II Sidenreng Rappang kembali memperlihatkan eksistensinya. Hal ini terbukti dengan adanya permintaan yang diajukan oleh Kepala Daerah Dati II Sidenreng Rappang utuk permintaan calon-calon anggota.[[132]](#footnote-133) Permintaan tersebut kemudian mendapatkan balasan dari Departemen Migrasi Koperasi Direktorat Koperasi Dati II Sidenreng Rappang berupa nama-nama calon yang akan diikutsertakan dalam Front Nasional.[[133]](#footnote-134) Mereka adalah Lambasang, Adam Edom, Abd Latif, Dali W dan Kamaruddin. Selain itu, Organisasi massa Pemuda Muhamadiyah juga mengirimkan utusan yang bernama Abd Chalik U sebagai calon anggota Front Nasional sesuai dengan permintaan surat yang telah diterima.[[134]](#footnote-135) Hal yang sama juga dilakukan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang 652 Dati II Sidenreng Rappang dengan mencalonkan 8 orang untuk menjadi anggota Front Nasional.[[135]](#footnote-136)

1. **Pembubaran Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara**

Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, jika satu peristiwa saja akan mampu mengubah peta politik Indonesia. Gerakan 30 September 1965 mengakibatkan Presiden Soekarno harus turun dari tampuk kekuasaannya. Presiden Soekarno yang memproklamirkan dirinya sebagai Presiden seumur hidup takluk pada situasi politik yang telah dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu. Ketegangan yang semakin lama semakin meningkat akibat belum jelasnya pelaku pembunuhan, membuat rakyat secara perlahan melakukan aksi sepihak. Diantara berbagai aksi yang dilakukan, demontrasi melawan komunis merupakan aksi yang mendominasi pada akhir tahun 1965.[[136]](#footnote-137) Hal ini pula yang kemudian membuat Presiden Soekrno berpikir bahwa *komunisphobia* masih menjadi senjata yang ampuh bagi lawan politiknya untuk melemahkan kekuasaannya.

*Komunisphobia* yang semakin berkembang setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 pada akhirnya menyudutkan Presiden Soekarno sebagai orang yang dekat dengan PKI. Tidak lama kemudian, Presiden Soekarno juga ikut tertuduh sebagai otak pembunuhan para petinggi Angkatan Darat tersebut. Situasi ini semakin tidak terkendali, ketika di waktu yang bersamaan kondisi perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan karena laju inflasi yang mencapai 650%.[[137]](#footnote-138) Pada awal tahun 1966, Presiden Soekarno harus menghadapi aksi-aksi mahasiswa yang semakin terkonsolidasi dengan baik guna menjatuhkannya dari tampuk kekuasaan. Aksi-aksi yang tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa) semakin sering hingga mencapai puncaknya pada tanggal 10 Januari 1966.[[138]](#footnote-139)

Pada tanggal 10 Januari, KAMI menggelar demonstrasi secara besar-besaran dengan menyerbu Istana Kepresidenan. Para mahasiswa menyampaikan tri tuntutan rakyat (Tritura) kepada pemerintah yang menuntut pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora, dan penurunan harga barang/perbaikan ekonomi. Demonstrasi yang awalnya hanya dilakukan oleh para mahasiswa, secara perlahan melibatkan massa dalam jumlah yang besar karena didukung oleh berbagai kesatuan aksi dan Front Pancasila. Front Pancasila awalnya adalah sekumpulan orang yang terorganisir dalam aksi pengganyangan Gerakan 30 September 1965 (KAP GESTAPU), namun kemudian berkembang dengan pesat setelah beberapa organisasi massa dan partai politik juga ikut bergabung.[[139]](#footnote-140) Munculya Front Pancasila membuat ABRI mendapatkan kekuatan tambahan dalam melaksanakan penumpasan sisa-sisa Gerakan 30 September 1965 yang sasarannya mengarah kepada para anggota PKI.

Kondisi tersebut kemudian ditanggapi oleh Presiden Soekarno dengan segera membubarkan KAMI dan memerintahkan untuk menangkap para tokoh-tokoh KAMI. Presiden Soekarno juga membentuk “Barisan Soekarno” yang bertujuan mempertahankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.[[140]](#footnote-141) Gagasan mengenai Barisan Soekarno mendapatkan dukungan dari Chairul Saleh yang pada saat itu menjabat sebagai pejabat ketua umum Front Nasional dan sekaligus mengumumkan bahwa sekertariat Front Nasional berfungsi sebagai sekertariat aksi tersebut.[[141]](#footnote-142) Langkah untuk membentuk Barisan Soekarno ternyata tidak cukup mengamankan posisi Presiden Soekarno sebagai satu-satunya penguasa di Indonesia, karena situasi politik yang terlanjur memanas.

Pada tanggal 11 Maret 1966, diadakan sidang kabinet yang membahas situasi keamanan negara dan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi sosial politik saat itu. Secara tidak terduga, massa yang terdiri dari mahasiswa dan tentara mengepung Istana Negara sebagai lokasi dilangsungkannya sidang kabinet.[[142]](#footnote-143) Oleh karena itu, Pasukan Pengamanan Presiden segera membawa Presiden Soekarno ke Istana Bogor sebagai tindakan pengamanan. Keberangkatan Presiden Soekarno ke Bogor kemudian diikuti oleh tiga Perwira Tinggi Angkatan Darat. Beberapa sumber menyebutkan, jika kepergian Mayjen TNI Basuki Rahmat, Brigjen TNI Amir Mahmud dan Brigjen TNI M. Jusuf ke Bogor bertujuan untuk menghibur dan menguatkan mental Presiden. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa ada suatu misi rahasia yang diemban oleh orang-orang yang dikenal dekat dengan Soeharto. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) sebagai hasil dari kunjungan para Perwira Tinggi Angkatan Darat tersebut.

Supersemar merupakan surat perintah yang diberikan oleh Preiden Soekarno kepada Letnan Jendral Soeharto untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman perpecahan yang ada di depan mata. Sayanganya, kepercayaan tersebut diingkari dengan menjadikan supersemar sebagai “secarik surat sakti” yang pada akhirnya menggiring Presiden Soekarno pada pemakzulan. Supersemar dijadikan dasar oleh Letnan Jendral Soehrarto untuk menyingkirkan para tokoh yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno (Soekarnois). Selain itu, Letnan Jendral Soehrarto juga mengeluarkan Surat Keputusan Presiden/ Pangti ABRI/ KOTI No. 1/3/1966 yang berisi pelarangan dan pembubaran PKI beserta organisasi massa yang bernaung di bawahnya.[[143]](#footnote-144) Hal ini menandai dilaksankaannya penumpas secara legal terhadap orang-orang PKI yang dituduh sebagai pihak yang berada di balik peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Pada kalangan militer sendiri, beberapa pendukung-pendukung Letnan Jendral Soehrarto mendapatkan posisi penting. Orang kepercayaan Letnan Jendral Soehrarto yakni Mayjen Surono diangkat sebagai pemimpin militer di Jawa Tengah, Mayjen Sumitro di Jawa Timur, serta Rusmin Nurjadin yang diberi mandat untuk memimpin Angkatan Udara.[[144]](#footnote-145) Pengangkatan tersebut memungkinkan terjadinya pembersihan terhadap kalangan Soekarnois dalam tubuh kemiliteran terutama pada Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Pembersihan besar-besaran juga dilancarkan di kalangan pegawai negeri, sementara organisasi seperti Front Nasional diambil alih oleh orang-orang anti-kiri.[[145]](#footnote-146)

Setelah Front Nasional diambil alih oleh kalangan militer, Panglima Kodam Daerah Militer XIV/Hasanuddin Selaku Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah Sulawesi Selatan Tenggara mengeluarkan surat yang memutuskan untuk membekukan Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara beserta segenap cabang dan rantingnnya di seluruh wilayah Sulawesi Selatan Tenggara untuk sementara waktu sambil menunggu instruksi selanjutnya. Urusan aksi ganyang Malaysia yang selama ini berada di bawah koordinasi Front Nasional juga akan diambil alih oleh Panglima Kodam Daerah Militer XIV/Hasanuddin.[[146]](#footnote-147) Pada urusan personil, maka akan dikembalikan ke djawatan/instansi masing-masing dan atau akan disalurkan dengan sebaik-baiknya melalui mekanisme baru. Selanjutnya mengenai keuangan, penyelesaiannya akan diatur sebaik-baiknya sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini juga secara bersamaan menugaskan kepada Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara sebagai pelaksana tugas terhadap pembekuan kepengurusan Front Nasional dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Sejak meletusnya Gerakan 30 September 1965, aktivitas Front Nasional menurun secara drastis. Front Nasional hanya berkonsentrasi untuk menghilangkan *stigma* PKI dan berupaya untuk tetap bertahan. Memasuki tahun 1966 Front Nasional tidak mampu berbuat banyak untuk terus bertahan. Posisi Front Nasional kemudian diperjelas oleh ketua MPR A.H Nasution yang mengeluarkan Resolusi MPRS untuk menyelidiki organisasi yang dinilai “ekstrakonstitusional”, sehingga pada tanggal 10 Agustus 1966 secara resmi diperintahkan untuk membubarkan Front Nasional dengan alasan kegagalannya memenuhi tujuan dan penyelahgunaannya oleh PKI.[[147]](#footnote-148)

Setelah surat pembubaran Front Nasional secara resmi dikeluarkan, maka secara berangsur-angsur pembekuan Front Nasional yang ada di daerah juga dilaksanakan. Departemen Dalam Negeri Propinsi Sulawesi Selatan mengirimkan surat perintah pembekuan Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara kepada para Bupati/Walikota Kepala Daerah se Sulawesi Selatan Tenggara pada tanggal 18 Agustus 1966.[[148]](#footnote-149) Pembekuan ini secara otomatis menjadi akhir dari kiprah Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggra. Akan tetapi, karena orang-orang Front Nasional masih hadir dalam politik nasional hingga berakhirnya masa Pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1967 sehingga tahun ini menjadi titik akhir eksistensi Front Nasional di Indonesia khususnya di daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Dengan memperhatikan dan memahami uraian-uraian yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang berdirinya Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara ialah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1959 Tanggal 31 Desember 1959. Selanjutnya, secara berkesinambungan Pengurus Daerah Front Nasional dibentuk pada 17 Provinsi yang ada di Indonesia. Panitia Persiapan Pengurus Daerah Front Nasional merupakan pantia yang bertugas untuk Pengurus Daerah, Cabang dan Ranting Front Nasional di setiap daerah. Pada tahun 1962 telah resmi terbentuk Pengurus Daerah Front Nasional Sulawesi Selatan Tenggara dengan jumlah 23 anggota yang terdiri dari berbagai latar belakang baik dari partai politik, golongan fungsional, maupun golongan perseorangan dan pada tahun 1963 dinyatakan bahwa Pengurus Ranting di seluruh wilayah Sulawesi Selatan Tenggara telah terbentuk.
2. Aktivitas yang dilakukan oleh Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dalam rangka mewujudkan MANIPOL USDEK yakni, di bidang sosial, Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara berfungsi sebagai organisasi yang memobilisasi massa dalam kegiatan nasional seperti Konfrontasi Militer Perebutan Irian Barat, Operasi Dwikora Mengganyang Malaysia, Peringatan I Dasawarsa konferensi Asia Afrika, Peringatan HUT RI dan Hari Pahlawan. Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara juga turut serta dalam penggalangan dana membantu korban bencana alam yang ada di Indonesia dan di Sulawesi Selatan Tenggara. Hal ini dapat terlihat dengan dana bantuan yang dikirimkan oleh Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara kepada Pemerintah Dati I Bali ketika menghadapi letusan Gunung Agung. Pada bidang politik, Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara menjalankan program indoktinasi ajaran nasakom kepada masyarakat, terlibat dalam penyusunan instansi pemerintah, menerbitkan buletin yang bernama Berita Front Nasional, dan membantu pemerintah dalam membasmi sisa-sisa DI/TII. Pada bidang ekononomi, Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara melukukan pembentukan koperasi di berbagai daerah, mengintensifkan aktivitas pertainan dengan merahebiliter sejumlah persawahan dan memperbaiki jalur irigasi, memperhatikan nasib buruh dan karyawan serta mensukseskan Musyawarah Besar Tani.

105

1. Aktivitas yang dilakukakan oleh Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 hingga tahun 1967 dibuka dengan adanya permasalahan honorium yang diajukan oleh beberapa pengurus cabang. Selain itu, Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara juga berusaha meyakinkan masyarakat bahwa mereka tidak terlibat dan mengutuk peristiwa Gerakan 30 September 1965 dengan segera memberhentikan anggota PKI dari kepengurusan Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.
2. **Saran**
3. Penulis menyadari, bahwa pembahasan dalam skripsi ini masih perlu penambahan, utamanya pada bagian eksistensi Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 hingga 1967yang disebabkan oleh keterbatasan waktu dan kemampuan penulis untuk mendapatkan data-data yang lebih lengkap. Olehnya itu penulis mengharapkan agar diadakan penelitian lanjutan dan lebih mendalam oleh kalangan akademisi.
4. Pada pembahasan penelitian Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara, masih terdapat data yang perlu ditambahkan terkait sepak terjang berbagai elemen masyarakat dalam Front Nasional Daerah Sulawesi Selatan Tenggara. Olehnya itu tambahan data dan sumber dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam rangka merevisi dan lebih menyempurnakan hasil penelitian ini.
5. Penulis mengharapkan agar pemerintah memberikan perhatian dan mencarikan jalan keluar untuk pengembangan sejarahkhususnya mengenai sejarah sosial politik Sulawesi Selatan Tenggara.
1. Zesfi Febriani, “Front Nasional Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hlm. 14. [↑](#footnote-ref-2)
2. Muliadi L, “Peranan Republik Rakyat Cina Pada Masa Demokrasi Terpimpin dalam Politik di Indonesia (1959-1965)”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2003), hlm. 41. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-4)
4. Syarif, “Peranan Militer di Indonesia 1957-1966”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2003), hlm. 28. [↑](#footnote-ref-5)
5. Zesfi Febriani, *Op.Cit.,* hlm. 22. [↑](#footnote-ref-6)
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1959 Tanggal 31 Desember 1959 Mengenai Pembentukan Front Nasional. [↑](#footnote-ref-7)
7. Arsip Pemerintah Prophinsi Sulawesi Selatan Tenggara 1960-1964 Volume II. No. BP 35/1/14 Tanggal 14 Maret 1963 Tentang Keputusan-keputusan Musyawarah Front Nasional. No. Reg. 160. [↑](#footnote-ref-8)
8. Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Prophinsi Sulawesi Selatan, *Arsip Pemerintah Prophinsi Sulawesi Selatan Tenggara 1960-1964 Volume II*, (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, 2003), hlm. xxv. [↑](#footnote-ref-9)
9. M. Cholil, *Sejarah Operasi-operasi Pembebasan Irian Barat*, (Jakarta: Departemen Pertahanan-Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1979), hlm. 30. [↑](#footnote-ref-10)
10. Sugeng Priyadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-11)
11. Suhartono W Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)., hlm. 11. [↑](#footnote-ref-12)
12. Muhammad Saleh Madjid dan Abdul Rahman Hamid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Makassar: Rayhan Intermedia, 2008), hlm. 46. [↑](#footnote-ref-13)
13. Suhartono W Pranoto*, Op. Cit.,* hlm. 29. [↑](#footnote-ref-14)
14. Suhartono W Pranoto, *Op.Cit.,* hlm. 36. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibid, hlm. 36 [↑](#footnote-ref-16)
16. Ibid, hlm. 37. [↑](#footnote-ref-17)
17. Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Prophinsi Sulawesi Selatan Tenggara. *Op.Cit*.,

hlm. xxvi [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid, hlm. xxvi. [↑](#footnote-ref-19)
19. Edward L Palinggomang dan Suriadi Mapangara, *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*, (Makassar:Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Propinsi Sulawesi Selatan, 2004), hlm. 216. [↑](#footnote-ref-20)
20. Ibid, hlm. 216. [↑](#footnote-ref-21)
21. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Naional Indonesia VI Edisi Pemutakhiran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 365. [↑](#footnote-ref-22)
22. Sulewo Hadiwijoyo, *KaharMuzakkar dan Kartosuwityo: Pahlawan atau Pemberontak*, (Yogyakarta: Palapa, 2013), hlm. 24. [↑](#footnote-ref-23)
23. Faisal, *Nelayan Bajo di Sulawesi Tenggara*, (Makassar: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestari Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar, 2008), hlm. 28. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibid, hlm. 49 [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid, hlm. 51 [↑](#footnote-ref-26)
26. Edward L Palinggomang dan Suriadi Mapangara, *Op.Cit*., hlm. 317. [↑](#footnote-ref-27)
27. Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Prophinsi Sulawesi Selatan, *Transliterasi Memori Timbang Terima Residen Koordinator Sulawesi Selatan Alimoeddin DG. Mattiro 5 Nopember 1956-30 Djuni 1960*, (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Prophinsi Sulawesi Selatan , 2005), hlm. 41. [↑](#footnote-ref-28)
28. Gubernur kepala Dati I Sulawesi Selatan Tengggara Makassar, *Hasil Musjawarah Kerdja Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Se- Sulawesi Selatan Tenggara di Malino*, (Makassar:Gubernur kepala Dati I Sulawesi Selatan Tengggara Makassar, 1964), hlm. 25. [↑](#footnote-ref-29)
29. Ibid, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-30)
30. Sutrisno Kutoyo dkk, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1979), hlm. 80. [↑](#footnote-ref-31)
31. Ibid, hlm. 84 [↑](#footnote-ref-32)
32. Sarita Pawiloy, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1946 Daerah Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979/1980), hlm. 156. [↑](#footnote-ref-33)
33. Sutrisno Kutoyo dkk, *Op.Cit*., hlm. 103. [↑](#footnote-ref-34)
34. Edward L Palinggomang dan Suriadi Mapangara, *Op.Cit*., hlm. 241. [↑](#footnote-ref-35)
35. B Buhurhanuddin, *Pertumbuhan Industri dan Perkembangan Masyarakat di Sulawesi Tenggara*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayan, 1990), hlm. 26. [↑](#footnote-ref-36)
36. Sulewo Hadiwijoyo, *Op.Cit*., hlm. 57. [↑](#footnote-ref-37)
37. Sarita Pawiloy, *Op.Cit*., hlm. 30. [↑](#footnote-ref-38)
38. B Burhanuddin, *Op.Cit*., hlm. 17. [↑](#footnote-ref-39)
39. Sarita Pawiloy dan Mardanas Safwan, *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1980/1981), hlm. 18. [↑](#footnote-ref-40)
40. Sutrisno Kutoyo dkk, *Op.Cit*., hlm. 105. [↑](#footnote-ref-41)
41. Sarita Pawiloy dan Mardanas Safwan, *Op.Cit*., hlm. 16. [↑](#footnote-ref-42)
42. Sutrisno Kutoyo dkk, *Op.Cit*., hlm. 80. [↑](#footnote-ref-43)
43. Edward L Palinggomang dan Suriadi Mapangara, *Op.Cit*., hlm. 239. [↑](#footnote-ref-44)
44. Sutrisno Kutoyo dkk, *Op.Cit*., hlm. 81. [↑](#footnote-ref-45)
45. Armuwani Dwi Lestariningsih, *Gerwani: Kisal Tapol Wanita di Kamp Plantungan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), hlm. 36. [↑](#footnote-ref-46)
46. Taufik Ahmad, Di Bawah Bayang-Bayang DI dan Militer: Perekembangan dan Kehancuran PKI di Sulawesi Selatan*, Jurnal Sejarah dan Budaya Walasuji*, (Makassar: Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Makassar, 2011). Volume II No. 2. ISSN: 1907-3038, hlm. 155. [↑](#footnote-ref-47)
47. Ibid, hlm. 155. [↑](#footnote-ref-48)
48. Ibid, hlm. 157. [↑](#footnote-ref-49)
49. Ibid, hlm. 157. [↑](#footnote-ref-50)
50. Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 210. [↑](#footnote-ref-51)
51. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Op.Cit*., hlm. 349. [↑](#footnote-ref-52)
52. Zesfi Febriani, *Op.Cit.,* hlm. 4. [↑](#footnote-ref-53)
53. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 166 Tahun 1960 Tentang Peraturan Rumah Tangga Front Nasional. Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume I No. Reg. 664 [↑](#footnote-ref-54)
54. Instruksi Front Nasional No. 1 Tahun 1961. Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume I No. Reg. 664 [↑](#footnote-ref-55)
55. Arsip Prophinsi Sulawesi Selatan Tenggara1960-1964 Volume II No. Reg. 159 [↑](#footnote-ref-56)
56. Keputusan Front Nasional No. 4/FN Tahun 1962. Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume I No. Reg. 664 [↑](#footnote-ref-57)
57. Struktur Pengurus Cabang Front Nasional Sulawesi Selatan Tenggra, lihat pada lampiran. [↑](#footnote-ref-58)
58. Keputusan Front Nasional No. 5 Tahun 1962. Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume I No. Reg. 664 [↑](#footnote-ref-59)
59. Arsip Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa 1936-1973 No. Reg. 663 [↑](#footnote-ref-60)
60. Arsip Sidenreng Rappang (Sidrap) 1950-1978. No. Reg. 408 [↑](#footnote-ref-61)
61. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 658 Tahun 1961. Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume I No. Reg. 664 [↑](#footnote-ref-62)
62. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 165 Tahun 1960 Tentang Anggaran Dasar Front Nasional. Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume I. No. Reg. 664 [↑](#footnote-ref-63)
63. Arsip Sidenreng Rappang (Sidrap) 1950-1978. No. Reg. 408 [↑](#footnote-ref-64)
64. Arsip Selayar 1823-1973 Volume I. No. Reg. 1783 [↑](#footnote-ref-65)
65. Surat Gubernur Sulawesi No. Pol. 6/1/14 Tanggal 28 Februari 1958. Arsip Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa 1936-1973 No. Reg. 327 [↑](#footnote-ref-66)
66. Ferry Valdano Akbar, *Konfrontasi Merebut Irian Barat*, (Yogyakarta:*Research Center For Politics and Government Departement Of Politivs & Government*-FISIPOL UGM, 2010), hlm. 93 [↑](#footnote-ref-67)
67. InstruksiNo. 03/Inst/PBFN/XII/61Tanggal 28 Desember 1961. Arsip Selayar 1823-1973 Volume I No. Reg. 1783 [↑](#footnote-ref-68)
68. Surat Keputusan No. 09/Kpts/Sek/ SST/ 62. Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume I No. Reg. 664 [↑](#footnote-ref-69)
69. Surat KeputusanNo.Sp-0028/1/1962. ArsipSidenreng Rappang (Sidrap) 1950-1978 No. Reg. 408 [↑](#footnote-ref-70)
70. Surat No. 41/Front/62. Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume I No. Reg. 664 [↑](#footnote-ref-71)
71. Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang 1926-1988Volume I No. Reg. 779 [↑](#footnote-ref-72)
72. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 534 [↑](#footnote-ref-73)
73. M Cholil, *Op. Cit*., hlm. 90. [↑](#footnote-ref-74)
74. Arsip Pemerintah Prophinsi Sulawesi Selatan Tenggara 1960-1964 Volume II No. Reg. 35 [↑](#footnote-ref-75)
75. Arsip Pemerintah Daerah Tingkat II Polewali Mamasa 1918-1983 Volume I. No. Reg. 242 [↑](#footnote-ref-76)
76. Instruksi No. 001/ Instr/ PBFN/II/64. Arsip Sidenreng Rappang (Sidrap) 1950-1978 No. Reg. 408 [↑](#footnote-ref-77)
77. Pengumuan No. 1/Peng./Sek/1964. Arsip Pemerintah Prophinsi Sulawesi Selatan Tenggara 1960-1964 Volume II No. Reg. 163 [↑](#footnote-ref-78)
78. Arsip Sidenreng Rappang (Sidrap) 1950-1978 No. Reg. 408 [↑](#footnote-ref-79)
79. Arsip Statis Pemerintah Daerah Soppeng 1960-1967Volume II No. Reg. 3051 [↑](#footnote-ref-80)
80. Arsip Pemerintah Prophinsi Sulawesi Selatan Tenggara 1960-1964 Volume II No. Reg. 35 [↑](#footnote-ref-81)
81. Arsip Pemerintah Prophinsi Sulawesi Selatan Tenggara 1960-1964 Volume II No. Reg. 35 [↑](#footnote-ref-82)
82. Instruksi Sekjen Front Nasional No. 006/Instr/PBFN/III/1965. Arsip Sidenreng Rappang (Sidrap) 1950-1978 No. Reg. 408 [↑](#footnote-ref-83)
83. Arsip Bantaeng 1866-1973 Volume I No. Reg. 664 [↑](#footnote-ref-84)
84. Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 (Lembar Negara Tahun 1959 No. 149). [↑](#footnote-ref-85)
85. Ulf Sundhaussen, *Op.Cit*., hlm. 255. [↑](#footnote-ref-86)
86. Arsip Selayar 1823-1973 Volume I No. Reg. 1783 [↑](#footnote-ref-87)
87. Arsip Sidenreng Rappang (Sidrap) 1950-1978 No. Reg. 408 [↑](#footnote-ref-88)
88. Arsip Selayar 1823-1973 Volume I No. Reg. 1783 [↑](#footnote-ref-89)
89. Arsip Statis Pemerintah Daerah Soppeng Volume II 1960-1967 No. Reg. 3053 [↑](#footnote-ref-90)
90. Zesfi Febriani, *Op.Cit*., hlm. 26. [↑](#footnote-ref-91)
91. Ulf Sundhassen, *Op.Cit*., hlm. 271. [↑](#footnote-ref-92)
92. Pidato D.N Aidit yang berjudul Kobarkan Semangat Banteng . Laporan Politik Kepada Sidang Pleno kedua CCPKI yang diperluas dengan Komisi Verifikasi dan Komisi Kontrol Central di Jakarta tanggal 23-25 Desember1963. <https://www.marxists.org/indonesia/indones/KongresPKIke5/PKItidakhenti.htm> (diakses pada tanggal 25 Mei 2015) [↑](#footnote-ref-93)
93. Arsip Selayar 1823-1973 Volume I No. Reg. 1783 [↑](#footnote-ref-94)
94. Ulf Sundhaussen, *Op. Cit*., hlm. 272. [↑](#footnote-ref-95)
95. Seruan Kilat No. 197/4-b2/1964. Arsip Pemerintah Prophinsi Sulawesi Selatan Tenggara 1960-1964 Volume II No. Reg. 163 [↑](#footnote-ref-96)
96. Surat Kantor Urusan Agama Palopo kepada Kantor Urusan Agama Sulawesi No. 74/K/52/Rahasia Mengenai Berita Paksaan Mememluk Agama. Arsip Tana Toraja (1901-1959) No. Reg. 928 [↑](#footnote-ref-97)
97. Arsip Tana Toraja (1901-1959) No. Reg. 928 [↑](#footnote-ref-98)
98. Arsip Bantaeng 1866-1973 Volume I No. Reg. 664 [↑](#footnote-ref-99)
99. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 193 Tahun 1964. Arsip Statis Pemerintah Daerah Soppeng Volume II 1960-1967 No. Reg. 3050 [↑](#footnote-ref-100)
100. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ Komando Operasi Tertinggi No. 1/KOTI/1965. Arsip Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa 1936-1973 No. Reg. 664 [↑](#footnote-ref-101)
101. Keputusan Pengurus Besar Front Nasional No. 008/KPTS/PBFN/I/1965 . Arsip Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa 1936-1973 No. Reg. 664 [↑](#footnote-ref-102)
102. Rosihan Anwar, Soekarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan sebelum prahara politik 1961-1965, (Jakarat: Yayasan Obor, 2007), hlm. 337. [↑](#footnote-ref-103)
103. Ibid, hlm. 372. [↑](#footnote-ref-104)
104. M.C. Ricklefs, *Op.Cit*., hlm. 548. [↑](#footnote-ref-105)
105. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Op.Cit*., hlm. 429. [↑](#footnote-ref-106)
106. Iwan Siswo, *Panca Azimat Revolusi Jilid II: Tulisan, Risalah, Pembelaan, dan Pidato Sukarno 1926-1966*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), hlm. 114. [↑](#footnote-ref-107)
107. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi No. 11 Tahun 1961. Arsip Pemerintah Prophinsi SulawesI Selatan Tenggara 1960-1964 Volume II No. Reg. 298 [↑](#footnote-ref-108)
108. Arsip Pemerintah Prophinsi Sulawesi Selatan Tenggara 1960-1964 Volume II No. Reg. 35 [↑](#footnote-ref-109)
109. Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang 1926-1988 Volume I No. Reg. 779 [↑](#footnote-ref-110)
110. Arsip Pemerintah Sulawesi Selatan Tenggara 1960-1964 Volume II No. Reg. 298 [↑](#footnote-ref-111)
111. Arsip Statis Legium Veteran Republik Indonesia Tahun 1931-1985 No. Reg. 575 [↑](#footnote-ref-112)
112. Arsip Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa 1936-1973 No. Reg. 666 [↑](#footnote-ref-113)
113. Instruksi No. 04/Instr/PBFN/ II/1964. Arsip Bantaeng 1866-1973 Volume I No. Reg. 664 [↑](#footnote-ref-114)
114. Arsip Pemerintah Prophinsi Sulawesi Selatan Tenggara 1960-1964 Volume II No. Reg. 163 [↑](#footnote-ref-115)
115. Arsip Sidenreng Rappang (Sidrap) 1950-1978 No. Reg. 408 [↑](#footnote-ref-116)
116. Arsip Statis Pemerintah DAaerah Soppeng Volume II 1960-1967 No. Reg. 3053 [↑](#footnote-ref-117)
117. Arsip Sidenreng Rappang (Sidrap) 1950-1978 No. Reg. 408 [↑](#footnote-ref-118)
118. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Op.Cit.,* hlm. 484. [↑](#footnote-ref-119)
119. Ulf Sundhaussen, *Op.Cit*., hlm. 342. [↑](#footnote-ref-120)
120. Kerstin Beise, *Apakah Soekarno Terlibat G 30 S*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004), hlm. 21. [↑](#footnote-ref-121)
121. Ibid, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-122)
122. Arsip Bantaeng 1866-1973 Volume I No. Reg. 664 [↑](#footnote-ref-123)
123. Radiogram yang dikirim ke daerah pada tanggal 8 Oktober 1965 No 174/1965.Arsip Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa 1936-1937 Volume I No. Reg. 671 [↑](#footnote-ref-124)
124. Surat Keputusan tanggal 19 Oktober 1965 No. 53/Kpts/VI-D/X/65. Arsip Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa 1936-1937 Volume I No. Reg. 663 [↑](#footnote-ref-125)
125. Kutipan dari berita “Berdikari” tanggal 26/10-65 disalin oleh ST. Rabiah. Arsip Pemerintah Daerah Tingkat II Polewali Mamasa 1918-1983No. Reg. 239 [↑](#footnote-ref-126)
126. Instruksi No. 028/ Instruksi/ PBFN/ X/ 1965. Arsip Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa 1936-1937Volume I No. Reg. 671 [↑](#footnote-ref-127)
127. Instruksi No. Ag. 2631/Instr/XI/65 tanggal 15 Nopembegr 1965. Arsip Wajo 1927-1972 No. Reg. 384 [↑](#footnote-ref-128)
128. Instrukasi Sekertaris Jendral Front Nasional No. 34/Instr/XII/1965. Arsip Bantaeng 1866-1973 Volume I No. Reg. 664 [↑](#footnote-ref-129)
129. Arsip Bantaeng 1866-1973 Volume I No. Reg. 664 [↑](#footnote-ref-130)
130. Arsip Statis Pemerintah Derah Tingkat II Pinrang Tahun 1947-1985 No. Reg. 1029 [↑](#footnote-ref-131)
131. Arsip Statis Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa 1920-1974Volume II. No Reg. 572 [↑](#footnote-ref-132)
132. Surat No. Pol. L/8/1 tanggal 31 Mei 1966. Arsip Sidenreng Ranppang (Sidrap) 1950-1978 No. Reg. 430 [↑](#footnote-ref-133)
133. Surat No. 169/I.I/400-28 Tanggal 13 Juni. Arsip Sidenreng Ranppang (Sidrap) 1950-1978 No. Reg. 430 [↑](#footnote-ref-134)
134. Surat No. I/5-31/66 Tanggal 11 Juni 1966. Arsip Sidenreng Ranppang (Sidrap) 1950-1978 No. Reg. 430 [↑](#footnote-ref-135)
135. Surat No. 30/ Um/Tjab/66 Tanggal 8 Juni 1966. Arsip Sidenreng Ranppang (Sidrap) 1950-1978 No. Reg. 430 [↑](#footnote-ref-136)
136. Kerstin Beise, *Op.Cit*., hlm. 412. [↑](#footnote-ref-137)
137. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Op. Cit*., hlm. 543. [↑](#footnote-ref-138)
138. A Yusrianto Elga, *Misteri Supersemar: Dimanakah Supersemar Berada*, (Yogyakarta: Palapa, 2013), hlm. 26. [↑](#footnote-ref-139)
139. Zesfi Febriani, *Op. Cit*., hlm. 106. [↑](#footnote-ref-140)
140. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Op. Cit*., hlm. 545. [↑](#footnote-ref-141)
141. Zesfi Febriani, *Op. Cit*.., hlm. 89. [↑](#footnote-ref-142)
142. A Yusrianto Elga, *Op.Cit*., hlm. 28. [↑](#footnote-ref-143)
143. Ibid, hlm. 32. [↑](#footnote-ref-144)
144. Ulf Sundhaussen, *Op.Cit*., hlm. 413. [↑](#footnote-ref-145)
145. Ibid, hlm. 413. [↑](#footnote-ref-146)
146. Surat keputusan No: Kep-028/08/PPDD/1966 tanggal 5 Agustus 1966. Arsip Statis Pemerintah Daerah Soppeng Volume II 1960-1967 No. Reg. 351 [↑](#footnote-ref-147)
147. Zesfi Febriani, *Op. Cit*., hlm. 102. [↑](#footnote-ref-148)
148. Surat No. Pol.1/5/42. Arsip Statis Pemerintah Daerah Soppeng Volume II 1960-1967 No. Reg. 351 [↑](#footnote-ref-149)